

**ANALISIS PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 - 2019**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Akbar Maulana Fakhruqi
Nomor Mahasiswa : 16313175
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS & EKONOMI YOGYAKARTA**

2020

**ANALISIS PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 - 2019**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Akbar Maulana Fakhruqi
Nomor Mahasiswa : 16313175
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS & EKONOMI YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 30 Oktober 2020



Akbar Maulana Fakhruqi
Akbar Maulana Fakhruqi

ANALISIS PENGANGGURAN TERBUKA
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 - 2019

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Akbar Maulana Fakhruqi

No. Mahasiswa : 16313175

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 12 November 2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Feriyanto', with a horizontal line underneath.

Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si,

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2011 - 2019**

Disusun Oleh : **AKBAR MAULANA FAKHRUQI**
Nomor Mahasiswa : **16313175**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 12 November 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Nur Feryanto, Prof. Dr. Drs. M.Si.



Penguji : Akhsyim Afandi, Drs. MA.Ec., Ph.D.



Mengetahui

Dean Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Heri Dika Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

Halaman Persembahan

- Kepada orang tua saya Bapak Hartono dan Ibu saya Rina Ferdianawati yang selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung saya sedari kecil hingga menggapai usia yang gemilang ini.
- Adik saya Khadafi dan Om Halla yang senantiasa memberi warna dalam keluarga yang sederhana ini.
- Keluarga besar Jamaah Arroyyan 1 yang banyak memberikan saya kesempatan untuk menjadi insan yang lebih baik.



“Carilah ilmu mulai dari ayunan ibu (kecil) sampai memasuki liang lahat (mati)”

Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarakathu

Dengan menghaturkan rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan banyak limpahan rahmat dan karunia-NYA kepada kami sehingga atas izin-NYA dapat diperkenankan menyelesaikan penulis tugas akhir yang bertajuk 'Analisis Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2019' guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa hadirnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya segala masukan dan kritik yang membangun dari pembaca dengan tujuan menyempurnakan penelitian ini sangat diharapkan. Dalam menyelesaikan tugas ini, kami banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah *Subhanau Wa Ta'ala* atas segala pemberian-NYA yang tak terukur dan ternilai banyaknya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.

6. Badan Pengelolaan Statistik (BPS) yang telah memberikan data yang digunakan untuk penelitian bagi penulis.

7. Terima kasih kepada rekan-rekan IESC yang telah memberikan kami kesempatan dalam berorganisasi dan menjadi generasi ekonomi *rabbani*.

8. Terima kasih banyak untuk keluarga besar Ilmu Ekonomi 2016 semoga teman-teman bisa mencapai cita-cita dan keinginan masing-masing di masa depan. IE SATU IE KELUARGA IE SATU KELUARGA.

9. Kepada Endah Malika yang selalu menjadi teman setia sampai akhir hayat nanti.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 30 Juni 2020

Penulis

Akbar Maulana Fakhruqi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel, Grafik, dan Gambar.....	xiv
Halaman Abstrak.....	xvi



BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10

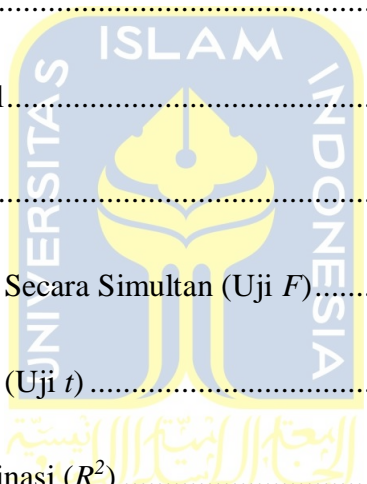
BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

2.1. Kajian Pustaka	12
---------------------------	----

2.2. Landasan Teori.....	28
2.2.1. Pengangguran	28
2.2.1.1. Pengertian Pengangguran	28
2.2.1.2. Macam-Macam Pengangguran	28
2.2.1.3. Penyebab Pengangguran	32
2.2.1.4. Dampak Pengangguran	34
2.2.2. Upah Minimum Regional.....	35
2.2.2.1. Pengertian Upah Minimum Regional	35
2.2.2.2. Tujuan Penetapan Upah Minimum	38
2.2.2.3. Hubungan UMR Terhadap Pengangguran	39
2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.2.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	39
2.2.3.2. Menghitung Pertumbuhan Ekonomi	39
2.2.3.3. Dampak Pertumbuhan Ekonomi	41
2.2.3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran	42
2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	43
2.2.4.1. Pengertian IPM	43
2.2.4.2. Manfaat Perhitungan IPM	44
2.2.4.3. Hubungan IPM Terhadap Pengangguran	45
2.2.5. Investasi.....	45

2.2.5.1. Pengertian Investasi	46
2.2.5.2. Bentuk-Bentuk Investasi	46
2.2.5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi.....	47
2.2.5.4. Hubungan Investasi Terhadap Pengangguran	48
2.3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian.....	50
2.3.1. Kerangka Berpikir	50
2.3.2. Hipotesis Penilaian	50
 BAB III Metodologi Penelitian	
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	51
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	52
3.2.1. Variabel Dependen (Y).....	52
3.2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	52
3.2.2. Variabel Independen (X)	52
3.2.2.1. Upah Minimum Regional (X1).....	52
3.2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi (X2).....	52
3.2.2.3. IPM (X3).....	52
3.2.2.4. Investasi (X4).....	53
3.3. Metode Pengumpulan Data	53
3.4. Metode Analisis.....	53
3.4.1. Pendekatan model <i>Ordinary Least Square/OLS (common effects)</i>	54

3.4.2. Pendekatan model efek tetap (<i>fixed effects</i>)	55
3.4.3. Pendekatan model efek acak (<i>random effects</i>)	57
3.5. Uji Asumsi Klasik	58
3.5.1. Uji Multikolinieritas	58
3.5.2. Uji Heteroskedastisitas.....	58
3.5.3. Uji Autokorelasi	59
3.6. Model Empiris	61
3.7. Pemilihan Model	61
3.7.1. Uji Kesesuaian Model.....	62
3.8. Uji Hipotesis.....	64
3.8.1. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji <i>F</i>).....	65
3.8.2. Uji Koefisien Regresi (Uji <i>t</i>)	65
3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66



BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskripsi Data Penelitian.....	67
4.2. Hasil dan Analisis Data.....	68
4.2.1. Deskriptif Data	68
4.2.2. Pemilihan Model Penelitian	69
4.2.2.1. Uji <i>Chow</i>	70
4.2.2.2. Uji <i>Hausman</i>	71

4.2.2.3. <i>fixed effects model</i>	71
4.3. Uji Asumsi Klasik	72
4.3.1. Uji Multikolinieritas	73
4.3.2. Uji Heteroskedastisitas.....	73
4.3.3. Uji Autokorelasi	74
4.4. Uji Hasil Statistik	77
4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)	77
4.4.2. Uji F	77
4.4.3. Uji t	78
4.4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	79
4.4.1. Interpretasi Hasil Regresi.....	79
4.4.2. Pembahasan.....	82
4.4.2.1. Pengaruh UMR Terhadap Pengangguran Terbuka.....	82
4.4.2.2. Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran Terbuka	83
4.4.2.3. Pengaruh IPM Terhadap Pengangguran Terbuka.....	86
4.4.2.4. Pengaruh Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka.....	88
 BAB V Kesimpulan dan Implikasi	
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Implikasi	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95



LAMPIRAN.....	101
---------------	-----

DAFTAR TABEL, GRAFIK, BAGAN, DAN GAMBAR

Tabel

1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2019	2
1.2. Jumlah Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2019	5
1.3. Presentase Pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2011 -2019)	6
1.4. Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019	7
1.5. Presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019.....	8
2.1. Studi Pustaka Penelitian Terdahulu.....	17
4.1. Hasil Deskriptif Semua Variabel Penelitian	68
4.2. Hasil Uji <i>Chow</i>	70
4.3. Hasil Uji <i>Hausman</i>	71
4.4. Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	71
4.5. Hasil Uji Multikolinieritas	73
4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
4.7. Hasil Uji Non-Korelasi	74
4.8. Tabel Durbin Watson.....	75
4.9. Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson	76

4.10. Hasil Uji Secara Simultan	77
4.11. Hasil Uji Secara Parsial	78
4.12. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2019.....	83
4.13. Distribusi Persentase Rata - Rata PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2019	84
4.14. Distribusi Persentase Rata - Rata PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2011 - 2019	85
4.15. Komponen Penyusun IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2019	87
4.16. Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru BPS	88
4.17. Rata-Rata dan Persentase Tenga Kerja Terserap di Provinsi Jawa Barat Akibat Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2011 - 2019	89
Grafik	
1.1. Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2019	7
Bagan	
2.1. Bagan Penjelasan Penduduk dalam Perekonomian	29
2.2. Kerangka Berpikir Penelitian	49
3.1. Bagan alur pemilihan model pada regresi data panel	64
Gambar	
4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2017 - Februari 2019	87

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka yang terjadi di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2019. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Banten di Pulau Jawa pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengangguran yaitu Upah Minimum Regional (UMR), pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode regresi data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Pada metode regresi data panel penelitian ini, model yang paling layak digunakan adalah model efek tetap (*fixed effects model*). Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa variabel UMR berpengaruh positif dan variabel PDRB berpengaruh negatif namun keduanya tidak signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan variabel IPM dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran

Kata Kunci: Pengangguran terbuka, UMR, PDRB, IPM, investasi, dan *fixed effects model*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

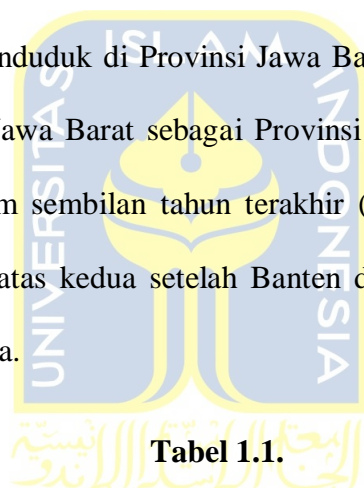
Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya indikator ekonomi suatu negara tersebut. Indikator tersebut memiliki hasil yang disebut dengan pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Kedua hasil tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian yang ada, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang terdapat pada negara tersebut. Besar kecilnya tingkat pengangguran di suatu negara dapat menggambarkan kondisi perekonomian negara tersebut apakah perekonomian negara tersebut sedang berkembang, melambat, atau bahkan mundur.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana masalah pembangunan ekonomi yang sering dihadapi oleh negara berkembang adalah bertambahnya jumlah pengangguran. Selain itu masalah tersebut juga berkembang menjadi masalah yang semakin rumit dan serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan kepada penduduk yang berpendapatan rendah (Rifqi, 2014). Tingkat pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang berdampak pada suatu negara tertentu yang harus membuang barang dan jasa yang sebetulnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran merupakan masalah sosial sebab akan mengakibatkan masalah-masalah sosial yang timbul akibat

kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi akibat menganggurnya seseorang (Aziz dkk., 2019).

Meskipun kasus pengangguran yang ada di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun masalah pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pusat perhatian. di beberapa provinsi di Pulau Jawa yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan penyumbang terbesar untuk kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia (Khotimah, 2018).

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 269,6 Juta jiwa. Dengan perhitungan pada tahun yang sama jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebanyak 49,02 Juta jiwa yang menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penduduk terbanyak se-Indonesia. Terlebih dalam sembilan tahun terakhir (2011 - 2019) Provinsi Jawa Barat menduduki posisi teratas kedua setelah Banten dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa.



Tabel 1.1.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2019 (dalam %)

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2011	11,27	9,99	6,62	4,97	4,81	13,68
2012	10,13	9,46	5,75	3,94	4,13	10,31
2013	9,13	9,02	5,77	3,5	4,14	9,56

2014	9,16	8,56	5,56	2,75	4,10	9,47
2015	7,8	8,56	5,15	4,07	4,39	9,06
2016	5,94	8,73	4,41	2,76	4,17	8,43
2017	6,25	8,35	4,36	2,93	4,05	8,51
2018	6,24	8,17	4,51	3,35	3,99	8,52
2019	6,22	7,99	4,49	3,14	3,92	8,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir (2011 - 2019) Provinsi yang dapat mengurangi angka pengangguran tertinggi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta (44,80%) dan yang paling terendah dalam menurunkan angka pengangguran adalah Jawa Timur (18,50%) dan setiap tahunnya penurunan angka pengangguran terjadi secara fluktuatif. Namun demikian pada akhir periode pencatatan BPS (Bulan Agustus setiap tahunnya) Jawa Barat menduduki posisi kedua setelah Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi menurut Provinsi pada tahun 2019 dengan jumlah kurang lebih 1,90 juta jiwa. Berdasarkan studi pustaka dan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga kuat mempengaruhi tingkat pengangguran di antaranya upah minimum, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan investasi.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan, dan 5.957 Desa. Jawa Barat sendiri terkenal dengan beberapa manufaktur baik lokal maupun multinasional yang berdiri disana. Selain itu Jawa Barat juga terkenal dengan keindahan panoramanya yang menjadi daya tarik wisatawan terutama di beberapa kabupaten yang belum

terjamah Industri yang masih banyak lahan pertanian dan pegunungan. Jawa Barat juga memiliki kekayaan laut dikarenakan letak geografisnya yang berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian Utara dan samudera Hindia di bagian Selatan menjadikan Jawa Barat memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Walaupun tingkat pengangguran di Jawa Barat tertinggi di Pulau Jawa, nilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 menurut hasil survei BPS Jawa Barat masuk sebagai 10 Provinsi yang memiliki nilai IPM tertinggi di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu dapat menggambarkan determinan-determinan apa saja yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kornelius (2016) bahwa Pertumbuhan ekonomi dan Investasi secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Nurcholis (2014) juga menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia juga berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pengangguran. Lebih lanjut Wildan dkk. (2019) mengemukakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran sedangkan pengaruh inflasi adalah negatif namun tidak signifikan terutama pada provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Selain itu meningkatnya pengangguran yang ada diantaranya disebabkan kenaikan jumlah Angkatan Kerja (AK) yang didefinisikan oleh BPS sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dari tahun ke tahun jumlah Angkatan Kerja (AK) yang ada mengalami kenaikan dan terkadang terjadi fluktuatif.

Tabel 1.2.

Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa) di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2019

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Bara	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2011	5.128.104	19.334.053	17.026.107	1.924.318	19.513.939	5.072.921
2012	5.339.994	20.474.894	17.513.488	1.983.542	20.167.517	5.177.151
2013	5.108.943	20.620.610	17.524.022	1.949.243	20.432.453	5.181.796
2014	5.063.479	21.006.139	17.547.026	2.023.461	20.149.998	5.338.045
2015	5.092.219	20.586.356	17.298.925	1.971.463	20.274.681	5.334.843
2016	5.178.839	21.075.899	17.312.466	2.099.436	19.953.846	5.587.093
2017	4.856.116	22.391.003	18.010.612	2.117.187	20.937.716	5.596.963
2018	5.429.203	22.738.827	18.234.221	2.142.046	21.004.695	6.088.115
2019	5.447.511	23.835.770	18.588.970	2.200.905	21.588.820	6.142.031

Sumber: BPS (diolah)

Pada tabel 1.2. dan 1.3. menunjukkan bahwa dengan bertambahnya angkatan kerja diikuti dengan kenaikan PDRB di Indonesia khususnya pada Pulau Jawa pada periode 2011 - 2017 walaupun kenaikannya yang tidak terlalu tinggi bahkan terjadi penurunan pada tahun-tahun tertentu.

Tabel 1.3.

Persentase Pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa Berdasarkan Harga Konstan

Tahun 2011 - 2019

Tahun	Provinsi					
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2011	6,73	6,51	6,03	5,17	7,22	6,38
2012	6,53	6,28	6,34	5,32	7,27	6,15
2013	6,11	6,06	5,81	5,4	6,55	5,86
2014	5,91	5,09	5,27	5,17	5,86	5,51
2015	5,91	5,05	5,47	4,95	5,44	5,45
2016	5,87	5,66	5,25	5,05	5,57	5,28
2017	6,2	5,35	5,26	5,26	5,46	5,73
2018	6,17	5,64	5,32	6,20	5,50	5,81
2019	5,50	4,82	5,13	6,18	5,23	5,24

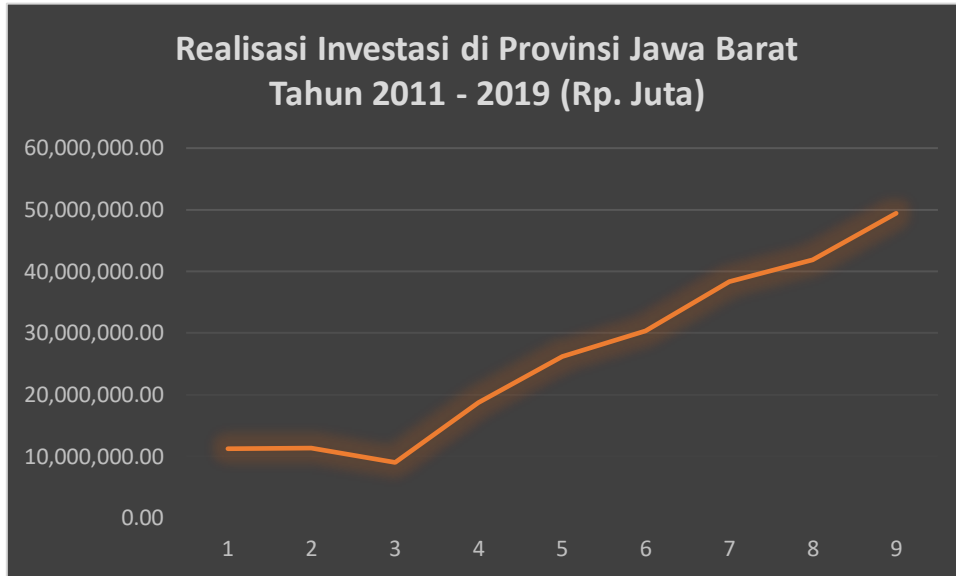
Sumber: BPS

Kenaikan PDRB yang tidak terlalu tinggi tersebut dimungkinkan karena pertumbuhan investasi secara umum

Selanjutnya realisasi investasi yang ada di Provinsi Jawa Barat terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2012 - 2013 yang terjadi penurunan yang digambarkan pada grafik 1.1. di bawah ini.

Grafik 1.1.

Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2019 (dalam juta rupiah)



Sumber : BKPM (diolah)

Tabel 1.4.

Realisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2019 (Rp. Juta)

Tahun	Realisasi Investasi
2011	11.194.259,20
2012	11.383.971,70
2013	9.006.138,10
2014	18.726.924,70
2015	26.232.174,50
2016	30.325.485,70
2017	38.390.637,90
2018	41.866.778,20

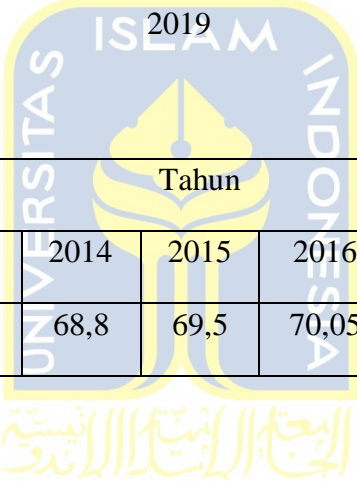
2019	49.431.127,40
------	---------------

Sumber: BKPM (diolah)

Selanjutnya pergerakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terjadi di Jawa Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,50%

Tabel 1.5.

Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 -



2019								
Tahun								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
66,67	67,32	68,25	68,8	69,5	70,05	70,69	71,3	72,03

Sumber: BPS (diolah)

Dari uraian data di atas dapat menggambarkan bahwa masalah pengangguran kerap menjadi isu yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu beberapa indikator yang dapat memengaruhi besar kecilnya tingkat pengangguran diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, upah minimum provinsi, dan investasi. Sehingga dari uraian di atas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan judul **Analisis Pengangguran Terbuka di Provisi Jawa Barat Tahun 2011 - 2019.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Menganalisis pengaruh investasi terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Untuk manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan referensi kepustakaan dan referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan investasi terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan, menambah informasi guna menentukan kebijakan dalam menangani masalah pengangguran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini meliputi pembahasan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini meliputi pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas sebagai acuan teoritis.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini meliputi tentang jenis penelitian, sumber data, definisi operasional, metodologi pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab ini meliputi pembahasan atas temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini meliputi kesimpulan dan hasil analisa yang diuraikan berdasarkan hasil temuan serta implikasi yang muncul sebagai kesimpulan terhadap rumusan masalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Pada penelitian tentang pengangguran ini kami menggunakan beberapa referensi dari para peneliti terdahulu yang membahas objek penelitian yang serupa sebagai berikut:

Hariski (2019) pada penelitiannya yang membahas pengaruh investasi, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di DIY periode 1986 - 2015 mengemukakan bahwa investasi hanya dalam jangka panjang yang berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pengangguran sedangkan pada jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk upah minimum regional baik jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Hal tersebut disebabkan ketika meningkatnya upah minimum regional berdampak pada pengurangan tenaga kerja guna menekan biaya modal sehingga meningkatkan angka pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuryani (2018), Audia (2018), dan Randy (2017), pada kasus provinsi yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di DIY berupa industri padat modal. Pada industri padat modal hanya mengandalkan penggunaan mesin dalam kinerjanya sehingga mengurangi jumlah pekerja manusia dan imbasnya membuat kesempatan kerja menurun sehingga meningkatnya jumlah pengangguran.

Sebaliknya, penelitian Aidh (2019) memberikan hasil yang berbeda. Dengan periode waktu yang lebih singkat (2010-2016) secara simultan dan parsial membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di DIY. Hal tersebut bermakna bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang terus bertambah memiliki pengaruh dalam mengurangi angka pengangguran. Namun, dari semua variabel independen tersebut hanya upah minimum yang memiliki dampak terhadap pengangguran dimana saat tingkat upah minimum meningkat maka pengangguran dapat ditekan dan sebaliknya. Namun dalam rentang waktu yang lebih panjang Achmad (2018) memberikan hasil yang berbeda dimana pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran dan hanya variabel upah minimum yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di DIY pada tahun 2001 - 2017.

Jafary (2018) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia juga memberikan kesimpulan bahwa pengaruh upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran di mana meningkatnya upah nominal dapat menekan laju pengangguran. Selanjutnya laju pertumbuhan PDRB dan investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan meningkatnya PDRB dan investasi berpengaruh terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

Nurhaida (2019) dengan menggunakan uji *chow* dan *hausman* menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 - 2016 variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan upah minimum bersama-sama berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Hasil yang serupa juga diungkapkan oleh Retno (2019), Feriyanto (2018) dan Zulhanafi (2013) bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di DIY hal tersebut juga serupa yang diungkapkan

oleh Gilang (2019). Sedangkan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di DIY di mana dengan meningkatnya investasi justru meningkatkan pengangguran di DIY. Hal tersebut dikarenakan porsi investasi yang ada di DIY terdiri dari investasi bangunan dan non-bangunan. Di mana investasi bangunan lebih menyerap tenaga kerja sedangkan investasi non-bangunan tidak menyerap tenaga kerja. Porsi investasi bangunan di DIY dalam kurun waktu 2010 - 2016 sebesar 81.28% sedangkan sisanya porsi investasi non-bangunan.

Aziz dkk. (2019) lebih umum menjelaskan tentang determinan tingkat pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2007 - 2016 di mana variabel pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara simultan berpengaruh negatif terhadap pengangguran di mana hanya pertumbuhan PDRB saja yang berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Hal tersebut berarti kenaikan tingkat PDRB memiliki dampak dalam menekan laju pengangguran, sedangkan laju pertumbuhan UMP dan inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Hal tersebut bermakna bahwa dinamika UMP tidak berpengaruh terhadap pengangguran.

Rifqi (2014) menjelaskan bahwa secara statistik 99,9% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah. Di mana saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan berarti terjadi kenaikan pada produksi barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan pada faktor-faktor produksi di antaranya adalah tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

Nurcholis (2014) menjelaskan hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran yang terjadi di Jawa Timur yang berpengaruh secara negatif signifikan namun terjadi secara tidak merata dikarenakan setiap daerah yang memiliki perbedaan pada Indeks Pembangunan Manusia. Burhanudin (2015) memberikan kesimpulan yang serupa bahwa Indeks Pembangunan Manusia berhubungan negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Di mana dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Soleh (2017) dalam penelitiannya yang bertajuk Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia mengkritisi di antara permasalahan yang menjadikan pengangguran di Indonesia ialah penerapan kebijakan pada upah minimum. Hal tersebut dikarenakan pada satu sisi peningkatan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tetapi pada sisi yang lain dengan meningkatnya upah minimum membebankan para pengusaha dan menurunkan daya saing terutama pada industri yang padat karya.

Temuan pada provinsi di luar Jawa dikemukakan oleh Fitri dkk. (2015) dengan studi kasus daerah Sumatera Barat di mana pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran, di mana semakin tinggi tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi akan menekan angka pengangguran. Sebaliknya tingkat upah berpengaruh positif terhadap pengangguran di mana ketika upah dinaikkan menyebabkan produsen melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga menyebabkan pengangguran. Selanjutnya adanya inflasi juga tidak berpengaruh terhadap pengangguran dikarenakan inflasi yang terjadi di Indonesia berasal dari kenaikan atau dorongan biaya produksi (*cost push inflation*) bukan berasal dari kenaikan tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Sebab inflasi yang berasal dari kenaikan permintaan akan menyebabkan produsen meningkatkan hasil produksi termasuk

dengan meningkatkan faktor produksi di antaranya tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Sedangkan inflasi karena kenaikan biaya produksi tidak akan menambah pada permintaan faktor produksi di antaranya tenaga kerja, bahkan sampai pada kadar tertentu dapat menurunkan tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Firdhinia dan Muslihatinningsih (2017) di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengangguran dengan variabel upah minimum yang cenderung lebih berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.



Tabel 2.1.

Studi Pustaka Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zulhanafi dkk. (2013)	Data yang digunakan adalah data runtut waktu/ <i>time series</i> . Data diolah menggunakan serangkaian uji data mulai dari uji stasioner, uji kointegrasi, uji autokorelasi, uji identifikasi, dan uji <i>reduce form</i> .	Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengangguran. Inflasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pengangguran.
2.	Muhammad Nurcholis (2014)	Data yang digunakan adalah data sekunder pada kabupaten di Jawa Timur tahun 2014. Teknik Analisa yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.	Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur pada tahun 2014.
3.	Mohammad Rifqi	Data yang digunakan adalah data <i>time series</i> dan	Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi tidak terdapat

	Muslim (2014)	<p><i>cross section</i> pada kurun waktu 2007 - 2012.</p> <p>Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel.</p>	<p>pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2001-2017. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2001-2017.</p>
4.	Muhammad Burhanudin (2015)	<p>Data yang digunakan adalah data PDRB, UMR, IPM, terhadap pengangguran di Banten pada tahun 2014 dan teknik analisa yang digunakan adalah regresi data panel.</p>	<p>Menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pengangguran.</p>
5.	Kornelius Johan dkk. (2016)	<p>Data menggunakan data sekunder yang sudah terarsipkan dalam publikasi dan jenis data yang digunakan adalah data runtut waktu/<i>time series</i>.</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Investasi secara simultan berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara parsial tidak</p>

		Data diolah secara keseluruhan dan parsial. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda.	berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran.
6.	Riza Firdhinia dan Fivien Muslihatinningsih (2017)	Penelitian ini merupakan penelitian <i>explanatory research</i> dan deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang diolah dari sumber BPS dan DISNAKER Kabupaten Jember pada tahun 2002 - 2013. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji normalitas, dan uji asumsi klasik.	Upah minimum dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Jember sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Jember.
7.	Ahmad Soleh (2017)	Penelitian ini merupakan penelitian <i>explanatory research</i> , deskriptif, dan naratif.	Upah minimum kerap menjadi permasalahan yang dilematis dalam masalah ketenagakerjaan dan pengangguran.

8.	Samuel Randy (2017)	<p>Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan model persamaan simultan (<i>Structural Equation Model</i>, SEM).</p>	<p>Upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Investasi tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi.</p>
9.	Nabila Audia (2018)	<p>Teknik data menggunakan analisis regresi data panel pada tahun 2013 - 2016</p>	<p>Variabel UMR terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah</p>

			<p>tahun 2013-2016. Variabel pertumbuhan ekonomi terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2016.</p>
10.	Nur Feriyanto (2018)	<p>Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010 - 2015 di DIY. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model pendekatan <i>fixed effect</i></p>	<p>Tingkat upah dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di DIY pada tahun 2010 - 2015</p>
11.	Rean Achmad Faherzi (2018)	<p>Data yang digunakan adalah data <i>time series</i> pada tahun 2001 - 2017 dan uji yang digunakan adalah uji analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, investasi, dan inflasi terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2001 - 2017. Sedangkan pada variabel upah minimum terhadap hubungan</p>

			negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2001 - 2017.
12.	Nuryani (2018)	Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau <i>path analysis</i> , untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antar variabel dengan tujuan baik yaitu pengaruh langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian komponen diuji adalah pengaruh langsung (<i>direct effect</i>), pengaruh tidak langsung (<i>indirect effect</i>) dan pengaruh total (<i>total effect</i>)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Kutai Barat. upah minimum, inflasi, dan investasi berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap pengangguran di Kutai Barat.

13.	Khusnul Khotimah (2018)	<p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal.</p> <p>Data berupa data sekunder dalam kurun waktu 2009 - 2015. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel</p>	<p>Tingkat pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran sedangkan upah minimum memiliki pengaruh hubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran di DIY pada tahun 2009 - 2015</p>
14.	Ridwan Jafary (2018)	<p>Data yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah data panel dari tahun 2006 – 2015.</p> <p>Teknik analisis menggunakan pendekatan <i>Common Effect Models (CEM)</i>, <i>Fixed Effect Models (FEM)</i>, <i>Random Effect Model (REM)</i>.</p>	<p>Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di DIY pada tahun 2006 - 2015. Sedangkan variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di DIY pada tahun 2006 - 2015</p>

15.	Mayora Hariski (2019)	Menggunakan data <i>Time Series</i> dari tahun 1986 - 2015 yang bersumber dari BPS dan BI (Bank Indonesia). Teknik analisis data yang digunakan <i>Error Correction Model (ECM)</i> .	Pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di DIY. Upah Minimum Regional dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pengangguran di DIY. Investasi dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di DIY.
16.	Fatchi Aidh Marean (2019)	Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu. Teknik uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan	Hasil uji secara parsial dan simultan yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pendidikan sarjana (S1) terbukti berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Yogyakarta. Inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran di DIY

		<p>analisis regresi berganda dan analisis linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pendidikan Sarjana dalam kurun waktu 2010 - 2016 di DIY.</p>	
17.	Elingga Gilang (2019)	<p>Objek yang digunakan adalah variabel jam kerja sebagai variabel dependen. Untuk variabel independennya adalah usia, pendidikan, upah, jenis kelamin, status rumah tangga, lapangan pekerjaan. Data yang digunakan data sekunder dari SAKERNAS pada tahun 2017 dan teknik analisis data menggunakan regresi robit.</p>	<p>Variabel upah menunjukkan hasil yang signifikan dan memiliki pengaruh negatif di mana jika upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur semakin tinggi maka pengangguran terselubung di Jawa Timur akan semakin kecil.</p>
18.	Wildan Aziz dkk.	<p>Jenis penelitian menggunakan <i>eksplanatory</i></p>	<p>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki</p>

	(2019)	<p><i>research</i>, penelitian yang menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek yang diteliti dan bertujuan untuk mencari ada tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan adalah data kuantitatif runtut waktu pada tahun 2007 - 2016 pada 6 provinsi di Pulau Jawa. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel.</p>	<p>pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2007 – 2016. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi Pulau Jawa periode tahun 2007 – 2016.</p>
19.	Kurnaini Nurhaida (2019)	<p>Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data panel dari tahun 2010 - 2016 di DIY yang diperoleh dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, BAPPEDA, BKPM, dan</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di DIY pada kurun waktu 2010 - 2016. Sedangkan variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran di</p>

		Dinas Kependudukan DIY	DIY pada tahun 2010 - 2016.
20.	Retno Herniawati (2019)	Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan empat variabel bebas (variabel independen) dan diolah menggunakan teknik analisis regresi data panel	Variabel upah minimum dan PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengangguran

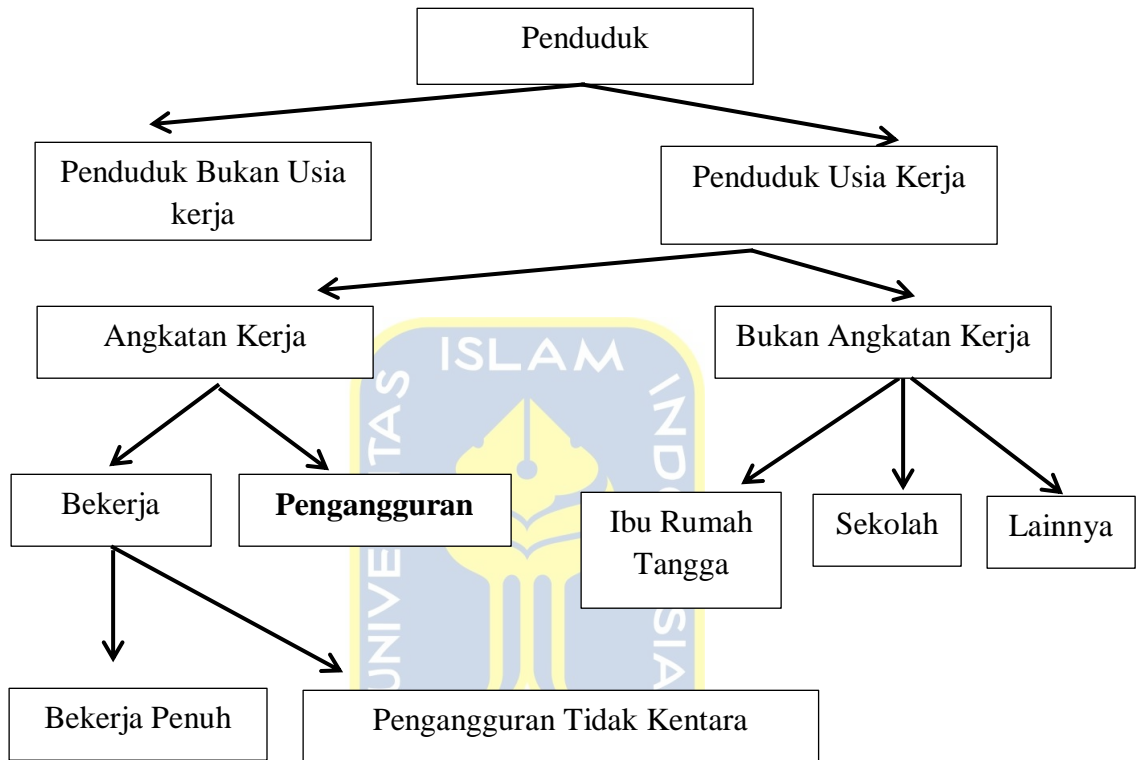
2.2.1.1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran yang selanjutnya juga disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang sudah masuk dalam usia kerja, ingin dan mampu untuk bekerja tetapi tidak (belum) dapat memperoleh pekerjaan (Feriyanto, 2014). Lebih lanjut lagi Feriyanto (2014) menjelaskan bahwa pengangguran adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. Selanjutnya Arsyad (2015) menjelaskan bahwa pengangguran ialah orang yang secara sukarela (tidak mau bekerja dikarenakan mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun terpaksa (mau dan mampu bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan).

Pengangguran itu sendiri merupakan selisih hasil dari jumlah angkatan kerja dikurangi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Feriyanto (2014) menjelaskan posisi pengangguran dalam bagan penduduk sebagai berikut:

Bagan 2.1.

Bagan Penjelasan Penduduk dalam Perekonomian



Sumber : Feriyanto (2014)

2.2.1.2 Macam-Macam Pengangguran.

Edward dalam Arsyad, 2017 mengklasifikasikan pengangguran ke dalam lima jenis yaitu:

1. **Pengangguran terbuka:** baik secara sukarela (tidak mau bekerja) maupun terpaksa (mau dan mampu bekerja namun tidak tersedia atau belum mendapatkan

pekerjaan). Lebih lanjut BPS (Badan Pusat Statistik) memerinci definisi tersebut sebagai berikut:

- a) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
- b) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

2. **Setengah menganggur** (*underemployment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka mampu kerjakan. BPS mengategorikan jenis pengangguran ini dengan sebutan pekerja tidak penuh yang terdiri dari:

- a) **Setengah Penganggur** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b) **Pekerja Paruh Waktu** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

3. Tampaknya bekerja namun tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk di antaranya:

- a) **Pengangguran tidak kentara** (*disguised unemployment*): yaitu para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan tersebut sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
- b) **Pengangguran tersembunyi** (*hidden unemployment*): yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
- c) **Pensiun awal**: yaitu fenomena yang biasa terjadi di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiunan sengaja dipermudah untuk menciptakan peluang bagi kaum muda untuk dapat menduduki jabatan di atasnya.

4. **Tenaga kerja lemah** (*impaired*): yaitu mereka yang mungkin bekerja secara penuh, namun intensitasnya lemah dikarenakan kekurangan gizi atau penyakit.

5. **Tenaga kerja yang tidak produktif**: yaitu mereka yang mampu bekerja secara produktif, namun karena ketersediaan sumberdaya komplementernya (pelengkap) yang kurang memadai, maka mereka tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan baik.

Sukirno (2013) mengelompokkan jenis-jenis pengangguran dengan menambahkan di antara jenis-jenis pengangguran yang ada di antaranya ialah

pengangguran musiman: yaitu penduduk yang bekerja pada waktu-waktu tertentu dan menganggur setelahnya.

2.2.1.3 Penyebab Pengangguran

Menurut Feriyanto (2014) adanya seseorang menjadi pengangguran dikarenakan beberapa penyebab sebagai berikut:

1. Pengangguran konjungtural yaitu pengangguran yang disebabkan turunnya kegiatan ekonomi. Jenis penyebab pengangguran ini juga disebut sebagai pengangguran siklikal di mana pengangguran ini disebabkan oleh kondisi tertentu suatu perusahaan. Di mana ketika kondisi perusahaan sedang berkembang (ekspansi) maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, namun saat kondisi perusahaan tengah mengalami kemunduran maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran.

2. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan perubahan struktural perekonomian suatu daerah atau negara tertentu. Misalnya masyarakat pertanian yang memiliki keahlian dalam bertani dan berkebun akan kehilangan pekerjaannya (menjadi pengangguran) suatu saat jika daerah/wilayah yang ditempatinya beralih fungsi ekonomi pada sektor lain.

3. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh kondisi musim. Baik perubahan pada iklim (musim) maupun kebiasaan masyarakat.

Contohnya seperti petani yang bekerja saat musim panen telah tiba namun menjadi menganggur setelahnya.

4. Pengangguran teknologis yaitu pengangguran yang terjadi oleh karena perubahan pada teknologi produksi. Umumnya terjadi pada perusahaan yang lebih mengutamakan padat modal daripada padat karya di mana peran mesin akan menggantikan tenaga kerja manusia.

5. Pengangguran wanita yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat suatu daerah atau negara yang melarang kaum wanita untuk bekerja. Jenis penyebab pengangguran ini juga disebut sebagai pengangguran politis dengan kebijakan yang mengatur tentang tenaga kerja.

6. Pengangguran geografis yaitu pengangguran yang terjadi dikarenakan adanya isolasi geografis suatu daerah terhadap kegiatan ekonomi.

7. Pengangguran budaya yaitu pengangguran yang dikarenakan budaya suatu masyarakat yang masih rendah sehingga menyebabkan mereka kurang mau berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Sukrino (2013) menambahkan beberapa penyebab pengangguran yang ada di antaranya:

1. Pengangguran deflator yaitu pengangguran yang disebabkan rendahnya lapangan pekerjaan sementara jumlah tenaga kerja yang melimpah.

2. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu pekerjaan menuju pekerjaan yang lain sehingga terjadi *gap* antar peristiwa tersebut.

2.2.1.4. Dampak Pengangguran

Arsyad (2017) menjelaskan bahwa pengangguran berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan distribusi pendapatan. Walaupun secara teoritis dampak pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran, namun secara kenyataan hal tersebut sulit dicapai jika kualitas pertumbuhan ekonominya masih rendah. Fenomena tersebut tergambarkan dengan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal di setiap kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Walaupun secara agregat perekonomian meningkat, namun peningkatan tersebut tidak dialami seluruh masyarakat. Pada akhirnya dampak dari rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat mengakibatkan dampak ekonomi dan sosial di antaranya:

1. Mereduksi daya beli masyarakat, dikarenakan banyak masyarakat yang menganggur sehingga mereka tidak mempunyai pendapatan untuk konsumsi.
2. Dengan tereduksinya daya beli masyarakat akan berdampak pada turunnya permintaan atas barang dan jasa, sehingga perekonomian menjadi lesu dan otomatis menyebabkan perekonomian struktural mengalami penurunan.

Pengangguran berdampak sangat erat terhadap kemiskinan dan distribusi pendapatan. Bagi masyarakat yang digolongkan sebagai pekerja paruh waktu dan pekerja tidak tetap selalu berada di antara kelompok masyarakat yang miskin. Namun tidak selamanya orang yang menganggur dikategorikan sebagai miskin dan orang yang bekerja sebagai kaya. Sebab dari definisi pengangguran yang sudah diuraikan, bahwa adanya orang menganggur dikarenakan kesukarelaan mereka akibat pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka masih tercukupi dari berbagai sumber keuangan yang ada (keluarga, saudara, anak, dan lainnya).

2.2.2 Upah Minimum Regional

2.2.2.1. Pengertian Upah Minimum Regional

Sesuai Undang-Undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan selanjutnya diubah melalui peraturan Kementerian Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur atau kepala daerah untuk wilayah tingkat provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Feriyanto (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu UMR atau UMP di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta Kebutuhan

Hidup Minimum (KHM). Dalam pengertian ini jumlah upah yang diterima pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya secara wajar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

2.2.2.2. Tujuan Penetapan Upah Minimum

Feriyanto (2014) menjelaskan, dalam pelaksanaan penetapan upah minimum dilakukan peninjauan sebanyak setahun sekali. Pada penerapannya pengusaha tidak boleh membayar upah lebih rendah dari yang sudah ditentukan dari upah minimum, bahkan jika pengusaha tidak mampu membayar upah minimum maka dapat dilakukan penangguhan yang diatur dalam Kepmenakertrans No.kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Dalam mempertimbangkan kelayakan upah minimum terdapat lima faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum yaitu:

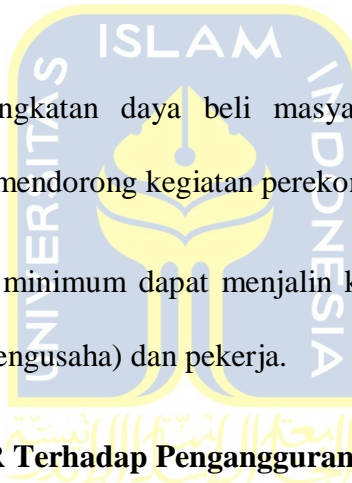
- a) Nilai Kebutuhan Layak (KHL)
- b) Produktivitas Makro
- c) Pertumbuhan Ekonomi
- d) Kondisi Pasar Kerja
- e) Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marjinal)

Dari kelima faktor tersebut, faktor KHL yang sering menjadi faktor tarik ulur antara serikat pekerja dengan pemerintah. Hal tersebut menjadi dilema dikarenakan pihak serikat pekerja menghendaki jumlah komponen pada KHL lebih banyak dan nilai masing-masing komponen lebih tinggi dibandingkan yang telah direkomendasikan pemerintah. Sedangkan keempat faktor lainnya juga harus dipertimbangkan mengingat faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai penyelaras dari upah minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah.

Simanjuntak (1996) menekankan perlu dan pentingnya penentuan upah minimum kepada pekerja dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Di saat kondisi pasar tenaga kerja mengalami surplus (jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan), penentuan upah minimum dapat menjadi penjamin keberlangsungan pekerja dari persaingan yang tidak sehat. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan bisa jadi pekerja menerima pekerjaan dengan upah yang tidak layak, namun mereka terpaksa menerimanya dikarenakan kebutuhan akan pekerjaan.
- b) Dengan ditentukannya upah minimum dapat mencegah terjadinya eksploitasi pemberi kerja terhadap pekerja. Adanya regulasi seperti itu dapat menjadi alasan penegak hukum untuk menindak pengusaha/pemberi kerja yang berlaku tidak adil terhadap pekerja.

- c) Penentuan upah minimum dapat dijadikan alat kontrol dan alat ukur pasar tenaga kerja.
- d) Menghindari tingkat kemiskinan absolut. Hal tersebut dikarenakan dalam penentuan upah biasanya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup.
- e) Peningkatan produktivitas kerja bisa terjadi dikarenakan dengan penentuan upah minimum pekerja dapat meningkatkan konsumsinya secara layak dan bergizi.
- f) Terjadinya peningkatan daya beli masyarakat dengan penentuan upah minimum dapat mendorong kegiatan perekonomian.
- g) Penentuan upah minimum dapat menjalin kerjasama yang harmonis antara pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja.



2.2.2.3. Hubungan UMR Terhadap Pengangguran

Seperti yang telah dijelaskan oleh Feriyanto (2014) dan Soleh (2017) bahwa terjadi dilema dalam penentuan upah minimum antara serikat pekerja dengan pemberi pekerja dan pemerintah. Di satu sisi pekerja menuntut adanya upah yang lebih tinggi sedangkan pemberi kerja menghendaki pengeluaran biaya yang serendah mungkin. Sebagaimana hasil yang telah diteliti oleh Hariski (2019), Audia (2018), Firdhania (2017), dan Nuryani (2018) menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan positif terhadap pengangguran. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingkat

UMR yang semakin tinggi menyebabkan pengusaha harus membayarkan biaya yang lebih untuk faktor produksi dalam hal ini tenaga kerja. Sehingga dengan membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha/pemberi kerja menyebabkan mereka akan mengurangi perekrutan tenaga kerja baru dan tenaga kerja lama sehingga meningkatkan angka pengangguran.

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.2.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu (Muta'ali, 2015). Sukrino (2013) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah mengukur prestasi suatu negara dari perkembangan suatu ekonomi. Setidaknya hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menghasilkan dua hal: (1) Kemakmuran atau taraf hidup masyarakat yang meningkat, (2) menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang akan terus meningkat jumlahnya (Sukirno, 2013). Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan *output* yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

2.2.3.2. Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2013) menjelaskan terdapat tiga pendekatan yang secara umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu:

1. Pendekatan pengeluaran

2. Pendekatan produk neto

3. Pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan pengeluaran

Cara ini digunakan dengan cara menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan atas barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut. Terdapat 4 komponen dalam membedakan pengeluaran atas barang dan jasa tersebut yaitu: (1) konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran pemerintah, (3) Pembentukan modal sektor swasta (investasi), (4) selisih ekspor impor.

2. Pendekatan produk neto

Cara ini digunakan dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Penjumlahan tersebut dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian.

3. Pendekatan pendapatan

Cara ini dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Pada umumnya pendapatan dalam perekonomian dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor produksi sebagai berikut:

- a) Pendapatan pekerja berupa upah/gaji
- b) Pendapatan dari usaha perseorangan
- c) Pendapatan dari sewa
- d) Keuntungan perusahaan

2.2.3.3. Dampak Pertumbuhan Ekonomi

Rahardja dan Manurung (2008) menjelaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian di antaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan.

Rakyat dapat dikatakan sejahtera jika setidaknya *output* perkapitanya meningkat. Hal tersebut tergambarkan dalam nilai PDB per kapita, semakin sejahtera masyarakat maka semakin besar pula nilai PDB perkapitanya.

2. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

Dengan meningkatnya *output* maka akan meningkatkan *input* dalam menghasilkan *output* yakni faktor produksi yang di antaranya adalah tenaga kerja. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk sehingga penduduk secara keseluruhan akan sejahtera.

3. Pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terjadi distribusi pendapatan secara merata, jika tidak terjadi pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi distribusi kemiskinan. Setidaknya terdapat dua syarat agar dikatakan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan distribusi pendapatan yaitu: (1) memperluas kesempatan kerja, (2) meningkatkan produktivitas.

4. Persiapan bagi tahapan kemajuan selanjutnya.

Dikarenakan pertumbuhan ekonomi diharapkan terjadi dalam jangka panjang dan berkesinambungan, maka pertumbuhan ekonomi diibaratkan seperti tangga untuk mencapai kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab perekonomian yang terus tumbuh secara menerus dalam jangka waktu yang lama akan menjadikan perekonomian suatu negara menjadi lebih maju dan modern daripada sebelumnya.

2.2.3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Secara teoritis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan *output*, sehingga akan dibutuhkan banyak faktor produksi di antaranya tenaga kerja untuk mengejar kapasitas *output* yang diharapkan tersebut sehingga tercipta lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Arsyad, 2016). Sukirno (2013) menjelaskan dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi perluasan pasar. Perkembangan tersebut akan mendorong adanya pertumbuhan produksi sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Studi yang paling populer dalam menggambarkan hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran adalah studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun (*Okun's Law*) yang mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, di mana semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi akan mereduksi tingkat pengangguran dan sebaliknya. Sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya oleh Hariski (2019), Aidh (2019), Aziz (2019), Nurhaida (2019), Feriyanto (2018), Kornelius (2016), dan Zulhanafi (2013) yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran.

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.2.4.1. Pengertian IPM

Menurut Feriyanto (2014) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur keberhasilan kinerja suatu perekonomian dengan melibatkan unsur penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Adapun komponen utama dalam penyusunan IPM ada 4 yaitu:

1. Produktivitas (*productivity*)
2. Pemerataan (*equality*)
3. Kestinambungan (*sustainability*)
4. Pemberdayaan (*empowerment*)

Sedangkan menurut BPS Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. UNDP (*United Nations Development Programme*) menetapkan peringkat IPM berdasarkan skala 0,00 - 1,00, yaitu:

Tinggi : Nilai IPM $\geq 8,00$

Menengah Atas : Nilai IPM antara $66,00 \leq \text{IPM} \leq 79,9$

Menengah Bawah : Nilai IPM antara $5,00 \leq \text{IPM} \leq 65,9$

Rendah : Nilai IPM $\leq 5,00$

2.2.4.2. Manfaat Perhitungan IPM

Feriyanto (2014) menjelaskan beberapa manfaat dengan adanya perhitungan IPM secara berkala yaitu:

1. Dapat dijadikan salah satu indikator relatif kinerja antar daerah di Indonesia dalam keberhasilan pembangunan manusia di wilayahnya.
2. Sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah baik secara total maupun pada masing-masing indeks dari IPM tersebut.
3. Sebagai dasar kebijakan pemerintah di suatu wilayah untuk memacu kinerjanya dalam meningkatkan komponen-komponen IPM yang belum optimal.

4. Sebagai tolok ukur besaran dana bantuan yang dapat dialokasikan ke daerah/wilayah tersebut.

5. Sebagai indikator kajian/evaluasi hasil kinerja kebijakan pembangunan.

2.2.4.3. Hubungan IPM Terhadap Pengangguran

Hubungan antara pengangguran dan IPM dapat dikaitkan dengan hubungan negatif sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nurcholis (2014) dan Burhanudin (2015). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah maka akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin menurun dan sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia rendah akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Selanjutnya menurut Todaro (2011) semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dampaknya perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja akibat meningkatnya produktivitas menyebabkan berkurangnya pengangguran.

Todaro (2011) juga menjelaskan hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan pengangguran bahwa pembangunan manusia memainkan peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja dan pada

akhirnya dengan meningkatnya pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah. .

2.2.5. Investasi

2.2.5.1. Pengertian Investasi

Sukirno (2013) menjelaskan bahwa investasi dapat disebut pula sebagai penanaman modal atau pembentukan modal atau dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan faktor produksi lainnya untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rajaraja dan Manurung (2008) menjelaskan dalam konteks filosofis bahwa yang disebut investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menciptakan/menambah nilai. Dalam konteks keilmuan ekonomi makro investasi dapat dijelaskan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk meningkatkan stok barang modal.

2.2.5.2. Bentuk-Bentuk Investasi

Rahardja dan Manurung (2008) mengelompokkan bentuk investasi ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan.

Umumnya bentuk investasi tersebut terwujud dengan adanya pendirian pabrik-pabrik industri, mesin-mesin, dan peralatan produksi lainnya. Dikarenakan bentuk

investasi dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama maka jenis investasi seperti ini biasa disebut sebagai investasi tetap (*fixed investment*). Agar investasi seperti ini dikatakan produktif dalam perekonomian maka nilai sesungguhnya dari investasi ini ialah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dikurangi penyusutan (depresiasi). Asumsi penyusutan terhadap barang modal harus dilakukan agar efisiensi ekonomis dari kegiatan produksi tetap terpelihara.

2. Investasi Persediaan.

Setelah berinvestasi pada modal tetap, investasi pada persediaan juga diperlukan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan produksi. Tujuan utama investasi dalam bentuk seperti ini ialah untuk meningkatkan penghasilan/keuntungan. Selanjutnya investasi berdasarkan sumbernya menurut Arsyad (2016) terdapat dua sumber yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri.

2.2.5.3. Faktor-Faktor Yang memengaruhi Investasi

Sukirno (2013) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat investasi di antaranya:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh
2. Suku bunga
3. Ramalan keadaan ekonomi di masa depan
4. Kemajuan teknologi

5. Tingkatan pendapatan nasional dan perubahannya di masa yang akan datang

6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan

Rahardja dan Manurung (2008) menambahkan dua faktor penting yang memengaruhi investasi yaitu:

1. Kondisi internal perusahaan yaitu dengan memperhatikan tiga aspek yang menggambarkan kondisi internal perusahaan, (1) tingkat efisiensi, (2) kualitas SDM, (3) teknologi yang digunakan. Jika ketiga aspek tersebut positif maka juga akan berpengaruh terhadap tingkat investasi yang akan dilakukan.

2. Kondisi eksternal perusahaan yaitu faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan investasi terutama tentang pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional serta aspek non-ekonomi seperti sosial politik.

2.2.5.4. Hubungan Investasi Terhadap Pengangguran

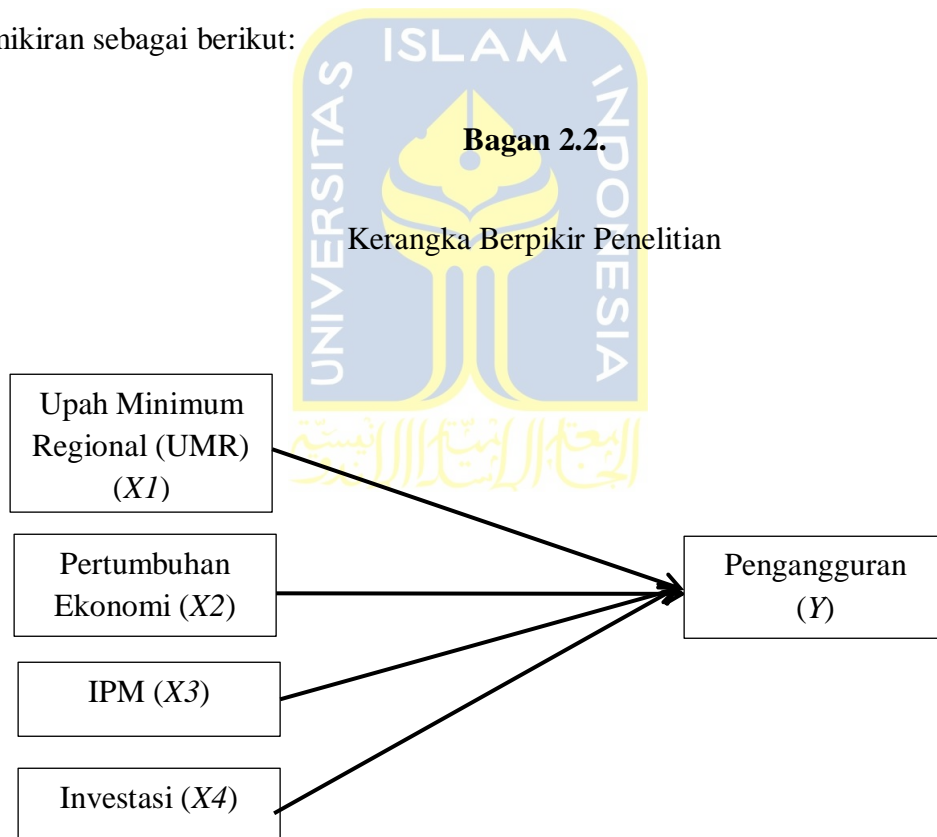
Investasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana meningkatnya perekonomian suatu negara di antaranya ditentukan dengan tingkat investasi yang tersedia dikarenakan adanya investasi yang diperlukan untuk meningkatkan akumulasi modal dengan tujuan untuk meningkatkan produksi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Kornelius (2016) dan Zulhanafi (2013) menunjukkan

bahwa investasi padat karya yang lebih mengedepankan tenaga kerja dapat mengurangi pengangguran.

2.3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Berpikir

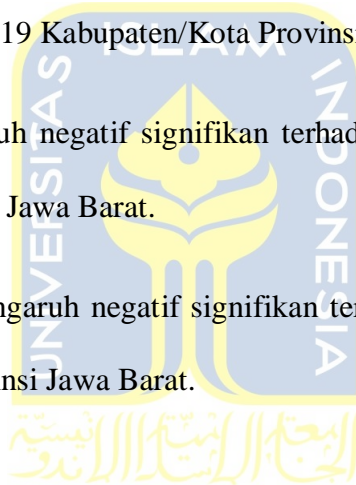
Berdasarkan kajian dan penjelasan teoritis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengusung kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.3.2. Hipotesis Penelitian

Dari rumusan kerangka berpikir penelitian di atas maka dikemukakan beberapa hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. UMR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Investasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berbentuk kuantitatif yang menggunakan data angka dengan rumus-rumus statistik (Marzuki, 2005). Selanjutnya Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota akan tetapi dikarenakan tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memenuhi kelengkapan data maka dalam penelitian ini dipilih 19 kabupaten/kota. Adapun 19 kabupaten/kota tersebut adalah Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang, Kuningan, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Depok. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Variabel dependen yaitu: pengangguran
2. Variabel independen yaitu: upah minimum, PDRB, IPM, dan investasi.

3.2. Definisi Operasional Variabel

3.2.1. Variabel Dependen (Y)

3.2.1.1. Pengangguran Terbuka

Adalah penduduk yang sudah masuk dalam usia kerja, ingin dan mampu untuk bekerja tetapi tidak (belum) dapat memperoleh pekerjaan. Satuan pada penelitian ini adalah jiwa.

3.2.2. Variabel Independen (X)

3.2.2.1. Upah Minimum Regional (UMR) (X1)

Adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Daerah untuk wilayah tingkat provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan upah yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan satuan rupiah.

3.2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan PDRB dari 19 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat terpilih dari tahun 2011 - 2019 dan satuan yang digunakan adalah satuan miliar rupiah

3.2.2.3. IPM (X3)

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ialah alat ukur keberhasilan kinerja suatu perekonomian yang melibatkan unsur pembangunan manusia secara keseluruhan dan berkesinambungan.

3.2.2.4. Investasi (X_4)

Adalah penanaman modal terhadap faktor produksi guna mengharapkan imbal hasil di masa yang akan datang. Pada penelitian ini satuan investasi yang digunakan adalah juta rupiah.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menghimpun dan menggunakan data sekunder di mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain (sudah tersedia) yang berbentuk data jadi dan telah diolah oleh pihak lain yang biasanya berwujud bentuk publikasi. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* (runtun waktu) dan *cross section* (data silang) dari tahun 2011 - 2019. Sumber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi berkalaanya, Bank Indonesia (BI), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

3.4. Metode Analisis

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis regresi data panel. Alasan penulis menggunakan analisis tersebut dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) dari tahun 2011 - 2019. Selain itu beberapa alasan penggunaan data panel ialah:

1. Dapat mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *cross section* murni dan *time series* murni
2. Pada data panel memberikan lebih banyak informasi, variasi, dan lebih efisien.
3. Memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.

(Gujarati, 2015)

Menurut Sriyana (2014) regresi dengan menggunakan data panel dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saat melakukan regresi dengan data *cross section* atau data *time series* yang terjadi secara terpisah. Selain itu bentuk regresi ini dikembangkan untuk tujuan efisiensi dalam melakukan estimasi. Secara umum estimasi dalam model dengan regresi data panel yang sering ditawarkan ada 3 model menurut Sriyana (2014), Wahyu (2017), dan Widarjono (2017) sebagai berikut:

3.4.1. Pendekatan model *Ordinary Least Square/OLS (common effects)*

Metode ini termasuk yang paling sederhana dan paling mudah dalam meregresi data panel (Sriyana, 2014) dan (Widarjono, 2017). Asumsi ini menganggap bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Hal tersebut dikarenakan dasar yang digunakan dalam regresi data panel ini mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya. Karena gambaran pada data bersifat generalisasi maka model tersebut disebut dengan model *common effect*.

Adapun persamaan

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_t$$

modelnya dapat

diekspresikan sebagai berikut :

Keterangan:

Y : Variabel dependen

X : Variabel independen

β_k : Koefisien slope atau arah

β_0 : Konstanta

ε : Komponen *error*

i : Objek/jumlah unit observasi

t : Waktu observasi

3.4.2. Pendekatan model efek tetap (*fixed effects*)

Jika pada pembahasan *common effect* mengasumsikan bahwa intersep dan slope sama baik antar waktu dan individu. Namun pada pendekatan model asumsi ini akan menghasilkan hasil regresi yang jauh berbeda dari kenyataan sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai macam faktor/variabel yang tidak semuanya dimasukkan ke dalam persamaan model sehingga dimungkinkan adanya intersep dan slope yang berbeda pada setiap individu dan waktu. Asumsi itulah yang menjadikan pendekatan pada model ini dinamakan dengan efek tetap (*fixed effect*). Selanjutnya pada model ini ada penekanan pada 2 asumsi (Sriyana, 2014) di antaranya:

1. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit intersep pada suatu hasil regresi sangat memungkinkan berubah untuk setiap individu dan waktu.

2. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu.

Persamaan pada model efek tetap selanjutnya dapat diekspresikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

β_k : Koefisien slope atau arah

i : banyaknya individu/unit observasi (1,2,...,n)

t : banyaknya waktu (1,2,...,t)

I : banyaknya variabel bebas

nxt : Banyaknya data panel

ε : residual

Dari persamaan di atas penyusunan persamaan pada regresi data panel sama pada umumnya, hanya saja pada intersep (β_0) terdapat huruf i yang melambangkan individu/objek saja tanpa huruf t yang melambangkan periode. Hal tersebut dikarenakan intersep hanya dipengaruhi oleh perbedaan individu saja sedangkan pengaruh waktu diabaikan karena dianggap tidak memberikan pengaruh pada perubahan intersep. Selanjutnya pada slope dilambangkan sebagai β^k dikarenakan besarnya untuk masing-masing individu maupun waktu dianggap tetap. Sebabnya pada penulisan slope tidak dimasukan/memiliki *subscript* i ataupun t dan yang ada hanya *subscript* k yang menunjukkan banyaknya variabel bebas dalam model regresi.

3.4.3. Pendekatan model efek acak (*random effects*)

Perbedaan yang paling mendasar pada model ini dibandingkan dua model regresi data panel sebelumnya adalah terakomodasinya perbedaan kedua model sebelumnya melalui *error*. Pada teknik ini juga memperhitungkan bahwa *error* diduga berkorelasi dengan koefisien regresi dan konstanta karena adanya perbedaan periode waktu dan perbedaan antar unit data. Pendekatan dengan menggunakan model ini menjadi alternatif apabila model *common effects* dan *fixed effects* tidak tepat.

Ada dua asumsi yang digunakan pada model ini yang berbeda dengan model regresi sebelumnya yaitu:

1. Intersep dan slope berbeda antar individu.
2. Intersep dan slope berbeda antar individu/unit dan periode waktu.

Selanjutnya, persamaan model efek acak dapat diekspresikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

β_k : Koefisien slope atau arah

m : banyaknya individu/unit observasi (1,2,...,m)

t : banyaknya waktu (1,2,...,t)

n : jumlah variabel bebas

nxt : Banyaknya data panel

ε : residual

3.5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dilakukan untuk melihat apakah data yang akan diteliti terbebas dari masalah normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji tersebut dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier dan tidak bias dengan varian yang minimum atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), yang berarti modal data tidak mengandung masalah (Widarjono, 2017). Beberapa uji asumsi klasik tersebut di antaranya:

3.5.1. Uji Multikolinieritas

Uji ini untuk mengetahui apakah terjadi kondisi hubungan linier antar variabel yang akan diestimasi. Di mana gejala yang terjadi dari adanya multikolinieritas adalah:

- a. Nilai *R square* atau R^2 tinggi, tetapi antar variabel independen tidak signifikan.
- b. Nilai koefisien antar variabel tinggi, sebaliknya jika nilai koefisien antar variabelnya rendah maka tidak terjadi multikolinieritas.
- c. Cara yang umum untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melakukan regresi *auxiliary* untuk mengetahui hubungan antara dua variabel (atau lebih) secara bersamaan.

3.5.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini untuk mengetahui ada tidaknya variabel gangguan yang mempunyai varian yang tidak konstan. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas adalah perhitungan *standard error* dengan metode OLS menjadi tidak bisa dipercaya

kebenarannya dan hasil interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi F maupun t tidak dapat lagi dipercaya.

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu data bisa dilakukan secara informal maupun formal.

1. Metode Informal yaitu, dengan cara mendeteksi pola residual melalui sebuah grafik skategram. Hal tersebut dapat dilihat jika residual mempunyai varian yang sama (Homoskedastisitas) maka tidak terdapat pola yang pasti dari residual. Sedangkan jika residual mempunyai sifat heteroskedastisitas, residual ini akan menunjukkan pola tertentu.

2. Metode Formal yaitu, terdiri dari metode Park, metode Glesjer, metode korelasi Spearman, metode GoldFeld-Quandt, metode Brusck-Pagan, dan metode White.

3.5.3. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi lain. Akibat dari adanya autokorelasi pada suatu data yang akan diestimasi menyebabkan varian data menjadi *under estimate* yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Estimator metode OLS masih tidak bias (*unbiased*) yang menyebabkan data menjadi tidak valid.

2. Estimator metode OLS masih linier yang menyebabkan data yang dihasilkan tidak menggambarkan yang sesungguhnya.

3. Estimator pada metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum lagi (*no longer best*) yang nilai determinasinya (R^2) terlalu besar.

Konsekuensi yang terjadi dari estimator tidak mempunyai varian yang minimum antara lain:

1. Menyebabkan perhitungan *standard error* metode OLS tidak bisa lagi dipercaya kebenarannya.
2. Interval estimasi maupun uji hipotesis yang berdasarkan uji t dan F tidak bisa lagi dipercaya untuk hasil evaluasi regresi.

Terdapat dua metode yang biasa digunakan dalam menguji masalah autokorelasi yaitu:

1. Metode Durbin-Watson (DW). Metode ini digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi random atau dengan membandingkan nilai Durbin Watson stat. Pada hasil estimasi dengan nilai tabel Durbin-Watson sesuai jumlah objek yang diobservasi (n) dan jumlah variabel independen yang dilakukan (k).

2. Metode Breusch-Godfrey. Metode ini akan memasukan variabel independen yang bersifat non-stokastik yang nantinya dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

3.6. Model Empiris

Model yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PT_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMR_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 Investasi_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- PT_{it} : Pengangguran Terbuka (satuan jiwa) di daerah i pada periode t .
- UMR_{it} : Upah Minimum Regional/UMR (satuan rupiah) di daerah i pada periode t .
- $PDRB_{it}$: Pertumbuhan Domestik Regional Bruto/PDRB (satuan rupiah) di daerah i pada periode t .
- IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia/IPM (satuan skala) di daerah i pada periode t .
- $Investasi_{it}$: Investasi (satuan rupiah) di daerah i pada periode t .
- β_0, β_n : Koefisien regresi (konstan)
- $\varepsilon_{t_{it}}$: *Error term*

Setelah model penelitian telah diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter di atas yang akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.7. Pemilihan Model

Dari ketiga tawaran model yang digunakan untuk meregresi data panel maka perlu dilakukan sebuah penentuan terhadap model apa yang nantinya akan digunakan pada penelitian nanti.

3.7.1. Uji Kesesuaian Model

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa analisis regresi data panel memiliki tiga pilihan model, sehingga diperlukan cara untuk memilih model yang tepat. Serangkaian pengujian untuk memilih model yang tepat menurut Sriyana (2014)

terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan model yang terbaik sebagai berikut:

1. Uji dengan membandingkan antara metode *fixed effects* dengan *common effects* yang biasa disebut dengan uji signifikansi *fixed effects* atau disebut juga uji-*F* atau uji *Chow*.
2. Uji dengan membandingkan antara model *fixed effects* dengan *random effects* yang biasa disebut dengan uji *Hausman*.
3. Uji LM (*Lagrange Multiplier*) yang digunakan untuk signifikansi *random effects*.

Dalam mengambil keputusan dari ketiga pendekatan tersebut digunakan uji hipotesis untuk penentuannya yakni:

Pada uji-*F*, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Ordinary Least Square*.

H_1 : *Fixed effect*.

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan di bawah ini:

Menerima H_0 jika uji-*F* nilai probabilitasnya $>$ alpha 5 persen (0,05);

Menerima H_1 jika uji-*F* nilai probabilitasnya $<$ alpha 5 persen (0,05).

Pada uji LM, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Ordinary Least Square*.

H_1 : *Random effect*.

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan di bawah ini:

Menerima H_0 jika uji- F nilai probabilitasnya $>$ alpha 5 persen (0,05);

Menerima H_1 jika uji- F nilai probabilitasnya $<$ alpha 5 persen (0,05).

Pada uji Hausman, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random effect model.*

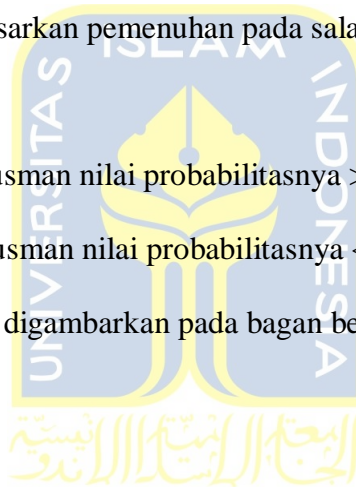
H_1 : *Fixed effect model.*

Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan dibawah ini:

Menerima H_0 jika uji Hausman nilai probabilitasnya $>$ alpha 5 persen;

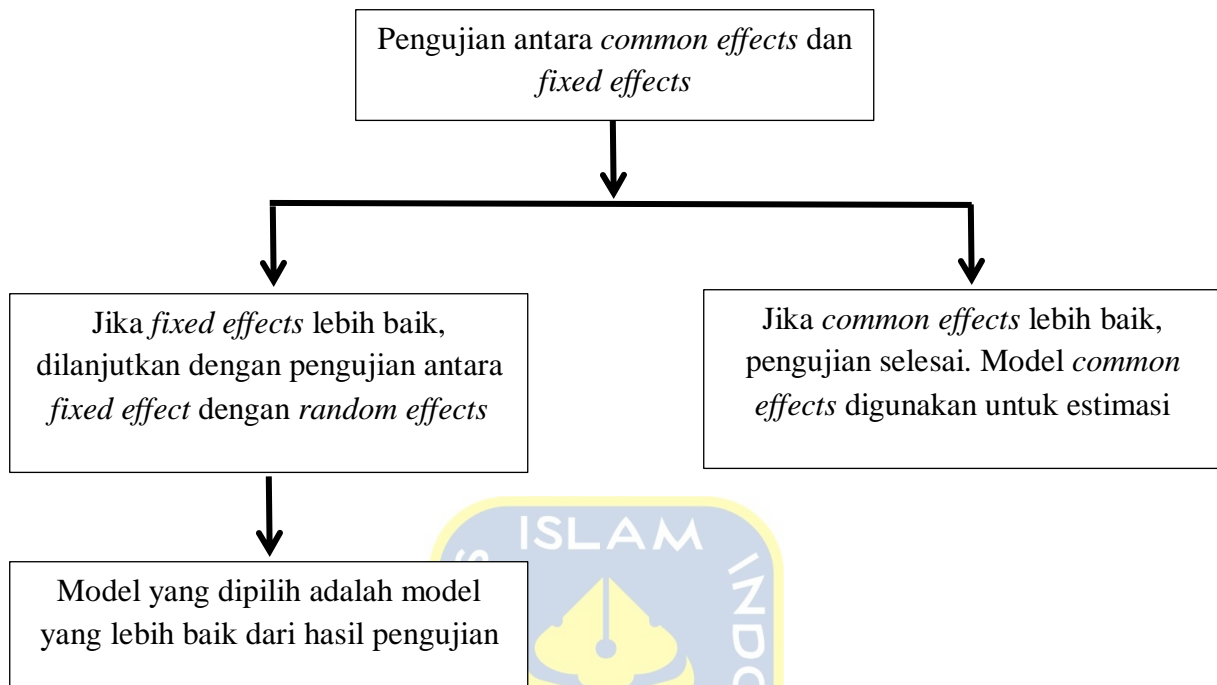
Menerima H_1 jika uji Hausman nilai probabilitasnya $<$ alpha 5 persen.

Jika dibuatkan alur dapat digambarkan pada bagan berikut:



Bagan 3.1.

Bagan alur pemilihan model pada regresi data panel.



3.8. Uji Hipotesis

Pada setiap penelitian, uji hipotesis digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian dengan pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data yang ada. Melalui uji hipotesis dapat diketahui apakah variabel bebas yang sedang diuji memberikan/mengkonfirmasi dampak yang sesungguhnya/signifikan terhadap variabel dependen atau tidak (Gujarati, 2015).

Pada pengujian hipotesis melingkupi uji- F (uji secara simultan), uji- t (uji parsial), dan analisis koefisien R^2 .

3.8.1. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji- F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh semua variabel independen (Gujarati, 2015). Pengujian hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan satu sisi penolakan atau *one tailed*. Adapun pengujian hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0 : \beta \neq 0$, Ada pengaruh secara bersama-sama yang signifikan antara semua variabel bebas dengan variabel terikat. Ketentuan untuk mengambil kesimpulan sebuah hipotesis ditolak atau diterima adalah jika $F_{sig} > 0,00$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel bebas dalam suatu model penelitian secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.8.2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-*t*)

Uji-*t* atau biasanya juga dikenal pengujian secara parsial yaitu pengujian yang dilakukan guna mendapatkan informasi apakah sebuah variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Gujarati, 2015). Asumsi yang dibangun pada uji ini adalah variabel lain bersifat tetap atau konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta \geq 0$. Artinya variabel independen, tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap dependen.

$H_1 : \beta < 0$. Artinya variabel independen, berpengaruh signifikan negatif terhadap dependen.

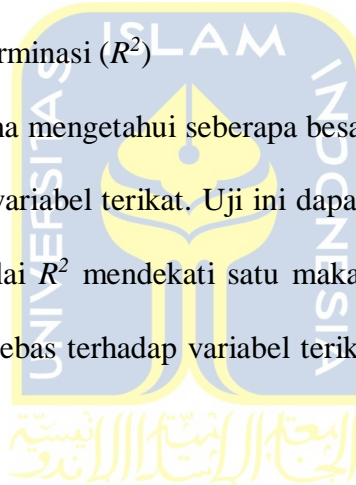
$H_0 : \beta \leq 0$. Artinya variabel independen, tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap dependen.

$H_1 : \beta > 0$. Artinya variabel independen, berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen.

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai R^2 . Di mana semakin nilai R^2 mendekati satu maka semakin besar kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model penelitian (Gujarati, 2015).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Pusat, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Publikasi Statistik Jawa Barat, Jurnal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan laman peramban lainnya yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2011 - 2019 dengan mengasumsikan beberapa variabel independen yang diduga berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Jawa Barat yaitu: Upah Minimum Regional (UMR), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri atas 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2011-2019. Metode analisis yang digunakan adalah regresi panel dengan spesifikasi metode *fixed effects*. Adapun variabel dependen dan independen yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Variabel dependen (variabel terikat) berupa data pengangguran dengan satuan jiwa.

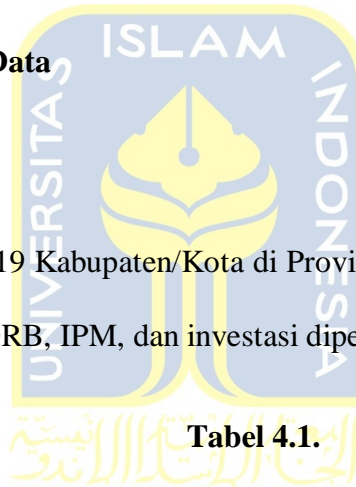
Variabel independen (variabel bebas) terdiri dari :

- a) (X1) Upah Minimum Regional (UMR) dengan satuan rupiah (Rp.)
- b) (X2) Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan satuan miliar rupiah (Rp.)
- c) (X3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- d) (X4) Investasi yang meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan satuan juta rupiah (Rp.)

4.2. Hasil dan Analisis Data

4.2.1. Deskriptif Data

Dari hasil olah data 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap variabel pengangguran, UMR, PDRB, IPM, dan investasi diperoleh hasil sebagai berikut:



Tabel 4.1.

Hasil Deskriptif Semua Variabel Penelitian

	PENGANGGURAN	UMR	PDRB	IPM	INVESTASI
Mean	83773,16	2054131	58028,88	70,09012	1769157
Median	73080	2000000	32250,5	68,69	390504
Maximum	254590	4234010	252051	81,62	27621000
Minimum	12811	749000	10371,18	59,38	174

Sumber: Olah Data Eviews9

Diperoleh deskripsi data bahwa pada periode tahun 2011 - 2019 tingkat rata-rata pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 83.773 jiwa, Upah Minimum Regional sebesar Rp. 2.054.131,1, PDRB sebesar Rp. 58.028,88 (satuan miliar rupiah), IPM sebesar 70,0012, dan Investasi PMDN dan PMA sebesar 1.769.157 (satuan juta rupiah). Selanjutnya untuk jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada Kabupaten Bogor tahun 2018 dengan jumlah 254.590 Jiwa, UMR tertinggi di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 4.594.320, PDRB tertinggi sebesar Rp. 252.051 (satuan miliar rupiah) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019, IPM tertinggi sebesar 81,62 di Kota Bandung pada tahun 2019, dan investasi tertinggi sebesar Rp. 27.621.000 (satuan juta rupiah) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2011.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran terendah terjadi di angka 12.811 jiwa di Kota Cirebon pada tahun 2013, UMR terendah terjadi sebesar Rp. 749.000 di Kabupaten Kuningan pada tahun 2011, PDRB terendah sebesar Rp. 10.371,18 (dalam miliar rupiah) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2011, IPM terendah sebesar 59,38 di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011, dan investasi terendah sebesar Rp. 174 (satuan juta rupiah) di Kota Depok pada tahun 2012.

4.2.2. Pemilihan Model Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menguji pemilihan model penelitian pada data panel terdapat tiga pendekatan yakni, *Common Effects*

Model, Fixed Effects Model, dan Random Effects Model. Pada penelitian ini model pendekatan yang terpilih adalah *Fixed effects Model*. Pemilihan model ini didasarkan dari uji *Chow* dan uji *Hausman* sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

4.2.2.1. Uji *Chow*

Uji ini digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik antara model *Common Effects* dengan model *Fixed Effects*. Dari hasil uji *chow* menggunakan aplikasi Eviews9 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Hasil Uji *Chow*

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross - Section F	149,429623	(18, 148)	0,0000

Sumber: Olah Data Eviews9

Dari hasil tersebut di atas diperoleh nilai prob. Sebesar 0,0000 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai kritis/alpha 5% (0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang bermakna model *Fixed Effects* lebih baik daripada model *Common Effects*.

4.2.2.2. Uji *Hausman*

Selanjutnya untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Fixed Effects* dengan *Random Effects* maka digunakan uji *Hausman* untuk mengetahuinya.

Tabel 4.3.

Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross - section random	22,127109	4	0,0002

Sumber: Olah Data Eviews9

Dari hasil tersebut diperoleh nilai prob. Sebesar 0,0002 lebih kecil dari nilai alpha 5% (0,05) di mana hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti model *Fixed Effects* lebih baik daripada model *Random Effects*.

4.2.2.3. *Fixed Effects Model*

Tabel 4.4.

Hasil *Fixed Effects Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10,71178	0,390433	27,43566	0,0000
Log (UMR)	0,018520	0,035761	0,517897	0,6053

Log (PDRB)	-0,051815	0,035166	-1,473435	0,1428
IPM	0,016176	0,010448	1,548280	0,0034
Log (Investasi)	0,009168	0,004517	2,029709	0,0442

Sumber: Olah Data Eviews9

Melalui pendekatan regresi dengan model *common effects* menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai probabilitas F statistik yang signifikan, yakni lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$. Selanjutnya untuk tingkat signifikansi model (R^2) pada model ini sebesar 0,877434 atau 87,7434% sedangkan 12,2566% ditentukan oleh variabel lain di luar model.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mencari estimator yang linier dan tidak bias dengan varian yang minimum atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dengan menguji beberapa uji klasik yang meliputi :

4.3.1. Uji Multikolinieritas

Tabel. 4.5.

Hasil Uji Multikolinieritas

VARIABLE	UMR	PDRB	IPM	INVESTASI
UMR	1	0,2276035	0,61750733	-0.0778791
PDRB	0,22726035	1	0,42753389	0,46251033
IPM	0,61750733	0,42753389	1	0,22191809
INVESTASI	-0,0778791	0,46251033	0,22726035	1

Sumber: Olah Data Eviews9

Hasil uji tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai statistik setiap variabel yang lebih kecil dari 0,8.

4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 4.6.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	43,06155	28,15617	1,529383	0,1283
UMR	2,15E-07	5,27E-07	0,407195	0,6845

PDRB	-7,320210	3,656126	-2,002176	0,0570
IPM	0,423494	0,293659	1,442130	0,1514
Investasi	-0,087666	0,082320	-1,064944	0,2886

Sumber: Olah Data Eviews9

Berdasarkan uji di atas dapat dibuktikan bahwa data yang akan diuji tidak terjadi Heteroskedastisitas atau tidak terjadi variabel gangguan yang tidak konstan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas setiap variabel yang lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ (0,05).

4.3.3. Uji Autokorelasi

Pada uji ini bertujuan untuk menguji asumsi bahwa tidak adanya korelasi antar variabel gangguan satu dengan observasi lain. Uji ini digunakan dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson stat. Pada *output* estimasi model regresi yang akan digunakan (pada penelitian ini menggunakan model *common effects*) dengan nilai tabel Durbin Watson.

Tabel. 4.7.

Hasil Uji Non-Korelasi

R-Squared	0,877434
Adjusted R-Squared	0,974081
S.E. of regression	0,162430

F-statistic	291,4008
Durbin-Watson stat	1,877927

Sumber: Olah Data Eviews9

Selanjutnya dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan jumlah n (observasi) sebanyak 19, k (variabel independen) sebanyak 4, dan alpha 5%.

Tabel 4.8.



Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1476	1.7386	1.0706	1.8376

Sumber: Widarjono (2017)

Menurut Widarjono (2017) terdapat cara dalam menguji terjadi tidaknya korelasi dengan pendekatan Durbin Watson sebagai berikut,

Tabel 4.9.

Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Daerah keraguan; tidak ada keputusan
$d_U < d < 4 - d_U$	Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negative
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Daerah keraguan; tidak ada keputusan
$4 - d_L < d < 4$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

Sehingga pada uji di atas diperoleh hasil nilai Durbin Watson stat. Sebesar 1,877927 di mana nilai d tersebut terletak di antara $d_U < d < 4 - d_U$ sehingga tidak terjadi autokorelasi. Menurut Widarjono (2017) nilai d stat. yang menjauh dari 0 dan mendekati 4 menunjukkan adanya korelasi yang negatif.

4.4. Uji Hasil Statistik

Dari serangkaian uji yang telah dilalui maka dipilih model *fixed effects* yang akan digunakan dalam menganalisa estimasi data pada penelitian ini.

4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada estimasi dengan *fixed effects* didapatkan nilai R^2 sebesar 0,877434. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel UMR, PDRB, IPM, dan investasi secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pengangguran terbuka sebesar 87,7434% sedangkan 12,2566% ditentukan oleh variabel lain di luar model.

4.4.2. Uji F (Uji secara simultan)

Tabel 4.10.

Hasil Uji Secara Simultan

R-Squared	0,877434
Adjusted R-Squared	0,974081
S.E. of regression	0,162430
F-statistic	291,4008
Prob (F-statistic)	0,000000

Pada estimasi dengan *fixed effects* didapati nilai probabilitas F sebesar 0,000000 < $\alpha = 5\%$ yang artinya hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel UMR, PDRB, IPM, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

4.4.3. Uji t (Uji secara parsial)

Tabel 4.11.

Hasil Uji Secara Parsial

Variabel	α (alpha)	prob.	Keterangan
C	5%	0,0000	Signifikan
UMR	5%	0,6053	Tidak Signifikan
PDRB	5%	0,1428	Tidak Signifikan
IPM	5%	0,0034	Signifikan
Investasi	5%	0,0442	Signifikan

1. Upah Minimum Regional (UMR)

Pengujian variabel Upah Minimum Regional (UMR) dengan $\alpha = 5\%$ secara statistik tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011 - 2019.

2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengujian variabel Pendapatan Domestik Regional (PDRB) dengan $\alpha = 5\%$ secara statistik tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011 - 2019.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengujian variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan $\alpha = 5\%$ secara statistik signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011 - 2019.

4. Investasi

Pengujian variabel investasi dengan $\alpha = 5\%$ secara statistik signifikan terhadap variabel pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011 - 2019.

4.4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.4.1. Interpretasi Hasil Regresi

Melalui hasil uji *fixed effects* pada penelitian ini diperoleh persamaan regresi,

$$\log PT_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log UMR_{it} - \beta_2 \log PDRB_{it} + \beta_3 \log IPM_{it} + \beta_4 \log Investasi_{it} + e_{it}$$

Atau,

$$\log PT_{it} = 10,71178 + 0,018520 \log UMR_{it} - 0,051815 \log PDRB_{it} + 0,016176_{it} + 0,009168 \log Investasi_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 10,71178 menunjukkan bahwa ketika variabel independen yang terdiri dari UMR, PDRB, IPM, dan investasi tidak ada (atau sama dengan nol) maka pengangguran terbuka tetap sebesar 10,71178 jiwa.

1. Koefisien Variabel UMR Sebesar 0,018520

$$\beta_1 = \text{UMR}$$

$$H_0: \beta_1 \leq 0$$

$$H_1: \beta_1 > 0$$

Hipotesis nol (H_0) adalah UMR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran dan hipotesis alternatif/penelitian (H_1) adalah UMR berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Secara statistik variabel UMR tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka.

2. Koefisien Variabel PDRB Sebesar -0,051815

$$\beta_2 = \text{Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)}$$

$$H_0 : \beta_2 \geq 0$$

$$H_1 : \beta_2 < 0$$

Hipotesis nol (H_0) adalah PDRB tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran dan hipotesis alternatif/penelitian (H_1) adalah PDRB berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran. Secara statistik variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka.

3. Koefisien Variabel IPM Sebesar 0,016176

$\beta_3 = \text{IPM}$

$H_0 : \beta_3 \geq 0$

$H_1 : \beta_3 < 0$

Hipotesis nol (H_0) adalah IPM tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran dan hipotesis alternatif/penelitian (H_1) adalah IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.

Hasil tersebut menjelaskan apabila variabel IPM mengalami kenaikan sebesar 1% maka jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 0,016176%. Karena koefisien IPM bertanda positif maka hasil perhitungan ini tidak sesuai dengan hipotesis.

4. Koefisien Variabel Investasi Sebesar 0,009168

$\beta_4 = \text{Investasi}$

$H_0 : \beta_4 \geq 0$

H₁ : $\beta_4 < 0$

Hipotesis nol (H₀) adalah investasi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran dan hipotesis alternatif/penelitian (H₁) adalah investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.

Hasil tersebut menjelaskan apabila variabel investasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 0,009168%. Karena koefisien investasi bertanda positif maka hasil perhitungan ini tidak sesuai dengan hipotesis.

4.4.2. Pembahasan

4.4.2.1. Pengaruh UMR Terhadap Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa UMR tidak signifikan yang berarti variabel UMR tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Hal tersebut menunjukkan bahwa berapapun besaran UMR yang ditetapkan pemerintah daerah tidak mempengaruhi terhadap tenaga kerja Jawa Barat yang lebih dari 50% penduduknya bekerja di sektor non formal seperti berusaha sendiri, buruh lepas dan lainnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2018 - 2019). Hal tersebut sebagaimana penelitian Randy (2017) dan Jafary (2018) yang mengemukakan bahwa UMR tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di DIY dikarenakan mayoritas tenaga kerja DIY bekerja di sektor non formal seperti berdagang dan buruh lepas.

Tabel. 4.12.

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2019

Jenis Pekerjaan	Tahun	
	2018	2019
Buruh/karyawan/pegawai	4023556	10136987
Berusaha Sendiri	1192886	4717270
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	1097432	2316309
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh di bayar	316003	775681
Pekerja bebas	343173	2526739
Pekerja keluarga/tidak dibayar	424973	1429972

Sumber: BPS Jawa Brat

4.4.2.2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa PDRB tidak signifikan yang berarti variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Hal tersebut menunjukkan bahwa berapapun tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 19 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa barat. Hasil tersebut memiliki persamaan sebagaimana yang pernah diteliti oleh Rifqi (2014) dan Fahrezi (2018) bahwa PDRB

tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia periode 2001 - 2017. Begitupula penelitian Nuryani (2018) dengan subjek Kabupaten Kutai Barat serta Khotimah (2018) dan Hariski (2019) dengan subjek provinsi DIY juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka.

Sebagaimana dampak daripada penduduk Jawa Barat yang kebanyakan bekerja di sektor non formal berdampak pada pesebaran PDRB Jawa Barat dalam kurun waktu 9 tahun terakhir yang menunjukkan lapangan usaha seperti pertanian, konstruksi, dan transportasi yang pada umumnya diisi tenaga kerja harian dan buruh lepas.

Tabel 4.13.

Distribusi Persentase Rata - Rata PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2019

PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Persentase
Industri Pengolahan	42
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,663333333
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,06
Konstruksi	8,406666667
Transportasi dan Pergudangan	5,666666667

Sumber: BPS (diolah)

Selain itu jika dilihat dari PDRB berdasarkan pengeluaran selama 2011 - 2019 porsi pembentukan modal pemerintah selama 9 tahun terakhir hanya sebesar 21,5% dari total PDRB sehingga belum memberi dampak terhadap pengurangan pengangguran.

Tabel 4.14.

Distribusi Persentase Rata - Rata PDRB Jawa Barat Menurut Pengeluaran Tahun

2011 - 2019

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran	Porsi Persen PDRB
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16529704,52	64,31724982
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	264322,1444	1,028480175
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1634395,744	6,359450603
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5541047,944	21,56027438
Perubahan Inventori	1068248,889	4,156567382
Net Ekspor Barang dan Jasa	662547,1111	2,577977604
PDRB	25700266,37	100

Sumber: BPS (diolah)

4.4.2.3. Pengaruh IPM Terhadap Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien variabel IPM sebesar 0,016176. Hasil tersebut menjelaskan apabila variabel IPM mengalami kenaikan sebesar 1% maka jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 1,6176%. Pada penelitian ini variabel IPM memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap pengangguran.

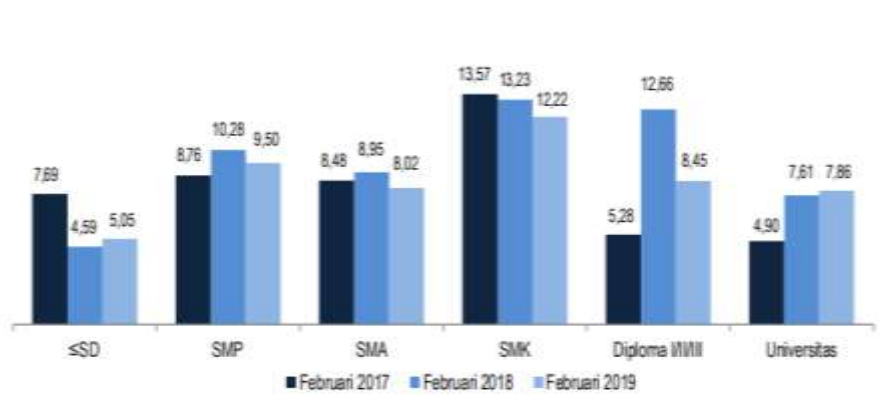
Hasil uji tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan hipotesis yang diajukan bahwa IPM memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran. Hal tersebut tidak mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Nurcholis (2014) dan Burhanudin (2015) bahwa variabel IPM memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran.

Kondisi tersebut juga dapat menggambarkan pada tren pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dari Februari 2017 - Februari 2019 di mana pengangguran dari masyarakat yang menyelesaikan studi Diploma hingga Universitas mengalami kenaikan. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulali (2017) bahwa IPM berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung pada tahun 2009 - 2015. Terjadinya hal tersebut dikarenakan pengangguran terdidik akan berupaya mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu menurut publikasi BPS Jawa Barat tentang IPM pada tahun 2019 juga menjelaskan

bahwa penurunan tingkat pengangguran cenderung lambat yang diakibatkan dari performa yang kurang prima dari sisi ketenagakerjaan.

Gambar 4.1.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2017 - Februari 2019



Sumber: BPS Jawa Barat

Tabel 4.15.

Komponen Penyusun IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 - 2019

Komponen IPM	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Usia Harapan Hidup (tahun)	71,56	71,82	72,09	72,73	72,41	72,44	72,47	71,30	72,85
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,91	11,24	11,81	12,08	12,15	12,30	12,42	12,45	12,48

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,46	7,52	7,58	7,71	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37
Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah)	9,25	9,32	9,42	9,44	9,78	12,03	10,29	10,79	11,15

Sumber: BPS Jawa Barat (diolah)

Tabel 4.16.

Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru BPS

Indikator	Satuan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		1007436 (Rp.)	26572352 (Rp.)

Sumber: BPS (diolah)

4.4.2.4. Pengaruh Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien variabel investasi sebesar 0,009168. Hasil tersebut menjelaskan apabila variabel investasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka jumlah pengangguran terbuka di Provinsi

Jawa Barat akan mengalami kenaikan sebesar 0,009168%. Pada penelitian ini variabel investasi memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Hasil uji tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan hipotesis yang diajukan bahwa investasi memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran. Hasil yang menjelaskan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pengangguran sebagaimana hasil yang telah dikemukakan oleh Nurhaida (2019), Nuryani (2018), Jafary (2018), dan Zulhanafi (2013). Sedangkan kondisi variabel investasi tidak memiliki hubungan signifikansi terhadap pengangguran sebagaimana hasil yang dikemukakan oleh Achmad (2018), Randy (2017), dan Rifqi (2014).

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada periode tahun 2011 - 2019 tenaga kerja yang terserap akibat adanya investasi didominasi pada investasi padat modal (sektor sekunder) bahkan pada sektor yang padat karya (sektor primer) hanya menyerap 1% saja selama periode tersebut.

Tabel 4.17.

Rata-Rata dan Persentase Tenaga Kerja Terserap di Provinsi Jawa Barat Akibat Investasi Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2011 - 2019

Sektor Usaha	Rata-Rata Tenaga Kerja Terserap	Persentase
--------------	---------------------------------	------------

Sektor Primer	244,4	1,169265265
Sektor Sekunder	167042,8	87,02430221
Sektor Tersier	22662,4	11,80643252
Total	191949,6	100

Sumber: BKPM Jawa Barat (diolah)

Di mana pada sektor sekunder yang padat modal diisi oleh industri-industri pengolahan yang kerap terjadi Pemutusan Tenaga Kerja (PHK) ketika terjadi perubahan faktor produksi seperti peningkatan teknologi sehingga mengurangi faktor produksi yang lain seperti tenaga kerja.



BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis secara parsial/individu terhadap variabel UMR menunjukkan pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka yang terjadi di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 - 2019. Hal tersebut dikarenakan lebih dari 50% penduduk Jawa barat bekerja disektor non formal sehingga berapapun besaran UMR yang ditetapkan pemertintah daerah tidak berpengaruh terhadap penduduk Jawa Barat.

2. Berdasarkan hasil analisis secara parsial/individu terhadap variabel PDRB menunjukkan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka yang terjadi di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 - 2019. Hal tersebut dikarenakan pesebarab PDRB berdasarkan lapangan usaha di Jawa Barat dalam 9 tahun terakhir diisi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang umumnya banyak diisi tenaga kerja harian/buruh lepas.

3. Berdasarkan hasil analisis secara parsial/individu terhadap variabel IPM menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap pengangguran terbuka yang

terjadi di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 - 2019. Hal tersebut menunjukkan ketika tingkat IPM mengalami kenaikan justru akan meningkatkan pengangguran terbuka. Masalah tersebut terjadi dikarenakan pengangguran terdidik akan berupaya mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Padahal belum tentu lapangan pekerjaan tersebut tersedia sehingga mereka tidak terserap ke dalam tenaga kerja.

4. Berdasarkan hasil analisis secara parsial/individu terhadap variabel investasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan ketika tingkat investasi meningkat menyebabkan kenaikan pengangguran terbuka di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 - 2019. Masalah tersebut terjadi dikarenakan investasi yang terjadi di Jawa Barat selama tahun 2011 - 2019 lebih didominasi pada sektor sekunder yang berisikan industri padat modal yang kurang menyerap bahkan mengurangi tenaga kerja.

5.2. Implikasi

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini adalah :

1. Tingkat UMR yang tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran sebaiknya lebih ditanggapi secara komprehensif oleh pemerintah walaupun UMR tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran. Selain itu pemerintah yang memiliki fungsi sebagai mediator antara serikat pekerja dan produsen/pemberi

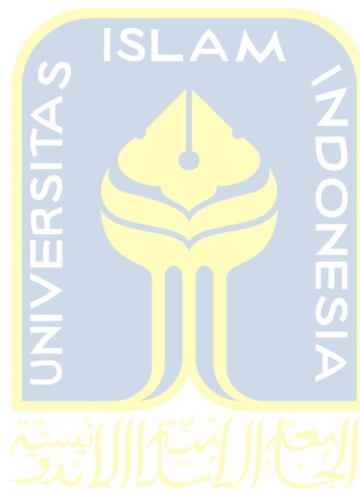
kerja dapat memberikan solusi yang saling menguntungkan di antara dua pihak sehingga dengan meningkatnya nilai upah minimum juga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah perlu melakukan program - program yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga akan menambah daya saing produk yang apabila upah riil dinaikkan maka baik tenaga kerja atau perusahaan (industri) tidak akan dirugikan.

2. Walaupun kenaikan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran namun pemerintah perlu mendorong produktivitas pada sektor penyusun PDRB yang *labor intensive*, sehingga PDRB meningkat dan sektor usaha yang *labor intensive* juga berkembang, akibatnya penyerapan tenaga kerja juga dapat ditingkatkan.

3. Dampak kenaikan IPM yang menyebabkan meningkatnya pengangguran maka pemerintah perlu mempelajari anomali yang terjadi terutama meningkatkan komponen-komponen penyusun IPM yang berpengaruh terhadap pengangguran seperti memberlakukan wajib belajar paling tidak 12 tahun (setingkat SLTA/ sederajat) dan membekali dengan keterampilan - keterampilan yang relevan dengan permintaan tenaga kerja. Selain itu upaya peningkatan komponen - komponen IPM juga harus diberlakukan secara merata agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan daerah yang lain .

4. Dampak kenaikan investasi yang menyebabkan pengangguran meningkat maka pemerintah perlu menentukan investasi pada lapangan usaha yang *labor intensive*

dengan memberikan insentif kepada investor, sehingga kenaikan investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Insentif pemerintah kepada investor dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan sejenisnya yang menguntungkan investor.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rean (2018), “Analisis Pengangguran di Indonesia”, Jurnal (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Aidh, Fatchi (2019), “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di DI Yogyakarta”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi.” *Prosedur Penelitian*”, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2002, cet ke-12.
- Arsyad, Lincoln (2015), *Ekonomi Pembangunan Edisi ke-5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Audia, Nabila (2018), “Analisis Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2016”, Jurnal (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Aziz, Wildan dkk. (2019), “Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2007 - 2016”, *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 6. hal. 43-49.
- Baeti, Nur. (2013), “Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2011”, *Economics Development Analysis Journal* Vol. 3. hal. 85 – 98

Burhanudin, Muhammad (2015), Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2008-2013, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Feriyanto, Nur (2018), “*Determinants of Unemployment in Regency/ City in Special Province Yogyakarta*” *European Research Studies Journal* Vol.11 hal. 376 - 380.

Feriyanto, Nur (2014), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Fitri, Irdas (2015), “Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat”, *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol. 4 hal. 85 – 109

Firdhania, riza dan Muslihatinningsih, Fivien. (2017), “Faktor-Faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember”, *e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 4 hal. 117 - 121.

Gilang, Elingga (2019), “Determinan Pengangguran Terselubung di Jawa Timur”, *Jurnal* (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Jawa Timur.

Gujarati, Damodar dan Porter, Dawn (2015), Dasar-Dasar Ekonometrika edisi kelima buku 2, Salemba Empat, Jakarta.

Hariski, Mayora (2019), “Pengaruh Inflasi, Investasi, Upah Minimum Regional, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di DI Yogyakarta”, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jafary, Ridwan (2018), “Analisis Faktor - Faktor yang memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di D.I.Y”, Jurnal (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Johan, Kornelius dkk. (2016), “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Investasi terhadap Pengangguran di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis, Vol.13. hal. 20 - 32.

Khotimah, Khusnul. (2018), “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY tahun 2009 - 2015”, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Vol.7. hal 599 - 609.

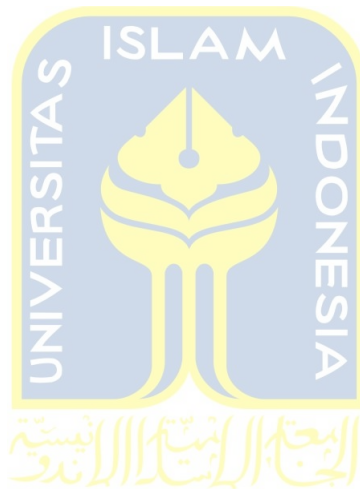
Marzuki, (2005), Metodologi Riset, Ekonisia, Yogyakarta.

Muta'ali, Lutfi.(2015), Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan. Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

- Nurcholis, Muhammad (2014), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang Vol.12 hal. 45 - 47.
- Nurhaida, Kurnaini (2019), “Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2016”, Jurnal (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nuryani (2018), “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat”, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman Vol.3
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala (2008), Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Randy, Samuel (2017), “Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan”, Jurnal Adminstrate Vol. 4 hal. 8 - 14.
- Retno, Herniawati (2019), “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah”, Diponegoro Journal of Economics Vol. 1 hal. 159 - 169.
- Rifqi, Mohammad. (2014), “Pengangguran Terbuka dan Determinannya”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 15. hal. 171-181

- Soleh, Ahmad (2017), “Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia”,
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6. hal. 83 - 92.
- Simanjuntak, P. J. (1996), Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta:
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sriyana, Jaka (2014), Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Aplikasi Kinerja Bank
Syariah di Indonesia), Ekonisia, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono (2013), Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, Rajawali Pers,
Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2011. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesebelas,
Erlangga, Jakarta.
- Widarjono, Agus (2015), Statistika Terapan Dengan Excel & SPSS, UPP STIM
YKPN, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus (2017), Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya edisi keempat,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wahyu, Wing (2017), Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews edisi
kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Zulali (2017), “Analisis Faktor - Faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran di
Provinsi Lampung”, Jurnal (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi,
Universitas Medan, Sumatera Utara.

Zulhanafi (2013), “Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi Vol.2 hal. 85 - 109.



LAMPIRAN

Data Penelitian

Jawa Barat	Tahun	Jumlah Pengangguran (jiwa)	Umr (rupiah)	PDRB (miliar rupiah)	ipm	Investasi (juta rupiah)
Kabupaten Bandung	2011	145165	1123000	51250,25	67,78	399454,4
	2012	173575	1223800	54468,16	68,13	167964,4
	2013	158494	1388333	57690,59	68,58	336528,7
	2014	138048	1735473	61098,51	69,06	200701,7
	2015	60368	2001195	64696,97	70,04	440010,0
	2016	60301	2275715	68804,85	70,69	390504,0
	2017	64673	2463461	73039,45	71,02	2561488,8
	2018	81940	2678028	77603,12	71,75	2757558,2
	2019	97956	2893074	82336,63	72,41	2088052,1
Kabupaten Bandung Barat	2011	61868	1175959	20419,11	62,36	32143,5
	2012	65557	1236991	21651,88	63,17	33765,3
	2013	63266	1396399	22937,17	63,93	105967,7
	2014	51971	1738476	24261,00	64,27	23121,9
	2015	62679	2004637	25477,22	65,23	174251,7

	2016	62252	2280175	26925,88	65,81	835589,8
	2017	69110	2468289	28330,02	66,63	201504,0
	2018	63535	2683227	29888,89	67,46	43738,0
	2019	62695	2898744	31398,35	68,27	41704,4
Kabupaten Bekasi	2011	123029	1286421	164538,84	68,66	3936810,1
	2012	93375	1491866	175279,8	69,38	989492,4
	2013	97922	2002000	186206,59	70,19	1981310,6
	2014	94436	2447445	197158,67	70,51	3618705,4
	2015	149859	2840000	205956,35	71,19	4789725,7
	2016	151267	3261375	215928,36	71,83	7435006,9
	2017	172412	3530438	228178,92	72,63	6183336,3
	2018	157991	3837939	242023,29	73,49	15000981,2
	2019	158959	4146126	252051,03	73,99	20209559,4
Kabupaten Bogor	2011	222638	1172060	98378,72	64,78	258515,7
	2012	198949	1269320	104286,98	65,66	954783,0
	2013	182128	2002000	110685,28	66,74	1030416,0
	2014	177222	2242240	117335,66	67,36	1754293,2
	2015	231854	2590000	124480,42	67,77	6787678,1
	2016	230787	2960325	131760,37	68,32	2706514,7
	2017	248368	3204551	139561,45	69,13	2137296,2
	2018	254590	3483667	148204,83	69,69	3321807,6

	2019	253014	3763405	156869,70	70,65	4442735,8
Kabupaten Cianjur	2011	97500	810500	20660,19	59,38	46048,0
	2012	114146	876500	2181,06	60,28	108830,1
	2013	145532	970000	22883,16	61,68	485379,5
	2014	153407	1500000	24041,99	62,08	49011,3
	2015	96574	1600000	25355,37	62,42	112714,9
	2016	96613	1837520	26981,37	62,92	597706,6
	2017	95100	1989115	28524,43	63,70	1319947
	2018	99647	2162366	30302,88	64,62	143341
	2019	105125	2336004	31974,68	65,38	704476,4
Kabupaten Cirebon	2011	93866	923000	22621,72	64,17	27494,0
	2012	145634	956650	23857,75	64,48	5591822,6
	2013	133553	1081300	25042,25	65,06	50919,6
	2014	121695	1212750	26312,19	65,53	50879,2
	2015	95559	1400000	27594,44	66,07	323179,3
	2016	94698	1592220	29149,31	66,70	349613,5
	2017	93662	1723578	30623,31	67,39	323241,8
	2018	105184	1873701	32160,19	68,05	971675,1
	2019	109442	2024160	33723,90	68,69	34588,4
Kabupaten Indramayu	2011	79018	944190	49804,92	61,47	4826,0
	2012	61549	994864	51389,04	62,09	6510,5

	2013	76501	1125000	52858,95	62,98	39138,1
	2014	61403	1276320	55463,80	63,55	67674,8
	2015	62998	1465000	55662,57	64,36	75513,0
	2016	63080	1665810	56706,18	64,78	1613,6
	2017	70511	1803239	57515,01	65,58	68000,0
	2018	70836	1960301	58238,91	66,36	110867,3
	2019	73911	2117713	60154,35	66,97	34970,2
Kabupaten Karawang	2011	98420	1159000	106174,68	65,21	2729147,6
	2012	116365	1269227	111424,08	65,97	321908,2
	2013	96586	2000000	120294,86	66,61	2076870,6
	2014	114004	2447450	126748,69	67,08	1775058,6
	2015	113693	2957450	132446,00	67,66	6164079,9
	2016	111464	3330505	141125,44	68,19	5651667,9
	2017	106717	3605272	149530,94	69,17	8361859,1
	2018	102138	3919291	159186,82	69,89	3199799,8
	2019	107723	4234010	163745,56	70,86	2976847,4
Kabupaten Kuningan	2011	42156	749000	10371,18	65,04	27621000
	2012	34608	805000	10962,96	65,60	566984,9
	2013	39814	857000	11648,54	66,16	247842,7
	2014	32118	1002000	12385,14	66,63	130012,5
	2015	35290	1206000	13175,12	67,19	131803,1

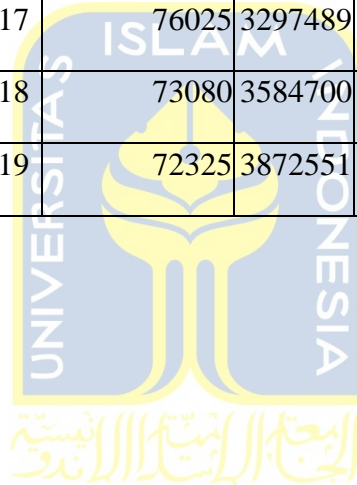
	2016	35449	1364760	13977,77	67,51	289000
	2017	36703	1477352	14866,62	67,78	323932
	2018	42735	1606030	15821,95	68,55	34783,6
	2019	48270	1734994	16860,52	69,12	5009,7
Kabupaten Purwakarta	2011	35657	961200	29893,01	65,51	126630,4
	2012	38354	1047500	31934,34	66,30	80121,0
	2013	37598	1693167	34216,42	67,09	498730,2
	2014	31905	2100000	36172,91	67,32	324869,1
	2015	31621	2600000	37892,41	67,84	417305,6
	2016	41299	2927990	40169,90	68,56	1748777,6
	2017	39370	3169549	42229,76	69,28	1967374,7
	2018	43399	3445616	44340,41	69,98	344236,4
	2019	43424	3722299	46287,98	70,67	990714,0
Kabupaten Subang	2011	62456	791200	20465,66	64,21	24794,4
	2012	60347	862500	20588,97	64,86	80230,0
	2013	52004	1220000	21431,37	65,48	297390,1
	2014	49193	1577956	22506,21	65,80	294,3
	2015	70682	1900000	23696,08	66,52	143107,0
	2016	69763	2149720	24976,92	67,14	66682,6
	2017	69358	2327072	26250,85	67,73	178301,8
	2018	67399	2529729	27412,66	68,31	519039,7

	2019	71618	2732899	28572,44	68,69	1534820,2
Kabupaten Sukabumi	2011	96834	850000	29863,30	61,14	34967,9
	2012	103443	885000	31767,70	62,27	129183,8
	2013	109416	1201020	33516,82	63,63	148608,7
	2014	88421	1565922	35520,70	64,07	7159949,5
	2015	101972	1940000	37263,58	64,44	539810,4
	2016	99535	2195435	39447,01	65,13	97967,9
	2017	86014	2376558	41692,62	65,49	79119,3
	2018	86565	2583556	44107,87	66,05	351704,7
	2019	89498	2791016	46668,62	66,87	218179,2
Kabupaten Sumedang	2011	39955	1110130	15390,93	66,16	146777,3
	2012	39106	1007500	16400,81	67,36	122339,8
	2013	33138	1381700	17194,51	68,47	276158,4
	2014	41883	1735473	18003,09	68,76	229600,2
	2015	47592	2001195	18945,48	69,29	18416,5
	2016	46711	2275715	17591,79	69,45	2620750
	2017	38978	2463461	18789,49	70,07	2954500
	2018	41264	2678028	19931,79	70,99	4326831,9
	2019	70447	2893074	21358,92	71,46	637802,2
Kota Bandung	2011	116798	1188435	11023,44	78,13	1510665,0
	2012	107384	1271625	119632,25	78,30	2514227,0

	2013	130052	1538703	129005,46	78,55	1577706,5
	2014	95971	2000000	138958,09	78,98	3420378,9
	2015	107352	231000	149566,79	79,67	5110203,0
	2016	106729	2626940	161227,83	80,13	6388994,7
	2017	102869	2543662	172851,96	80,31	994305,3
	2018	96465	3091345	185084,18	81,06	2128529,9
	2019	105067	3339580	197642,71	81,62	250438,5
Kota Bekasi	2011	116290	1275000	43946,08	77,48	80745,6
	2012	93676	1422252	46907,33	77,71	289266,0
	2013	111702	2100000	49741,13	78,63	158425,0
	2014	115463	2441954	52534,08	78,84	81262,4
	2015	111736	2954031	55462,73	79,63	1794227,0
	2016	111691	3327160	58831,08	79,95	1192407,9
	2017	130254	3601650	62202,01	80,30	11924077,9
	2018	132278	3915353	65844,24	81,04	2674864,9
	2019	124114	4229756	69404,62	81,59	4087818,4
Kota Bogor	2011	44985	1079100	19944,17	71,72	334514,0
	2012	39417	1174200	21203,57	72,25	7894,4
	2013	43856	2002000	22484,67	72,86	27499,6
	2014	43503	2352350	23835,31	73,10	177800,2
	2015	49942	2658155	25295,56	73,65	2824197,7

	2016	49187	3022765	27002,25	74,50	13433803,1
	2017	47438	3272143	28654,97	75,16	6453635,0
	2018	50395	3557146	30413,57	75,66	2830906,4
	2019	48731	3842785	32250,50	76,23	2405237,20
Kota Cimahi	2011	25996	1172485	14318,6	74,41	17109,4
	2012	21149	1224442	15212,15	74,99	223974,7
	2013	29856	1388333	16072,36	75,85	593879,4
	2014	26006	1735473	16955,24	76,06	2180,3
	2015	25434	2001200	17876,34	76,42	264528,4
	2016	25289	2275715	18882,16	76,69	1012744,7
	2017	25033	2463461	19907,13	76,95	52617,8
	2018	23584	2678028	21038,45	77,56	144719,7
	2019	23960	2893074	22641,83	78,11	91878,8
Kota Cirebon	2011	14280	923000	10677,43	71,49	1489,8
	2012	16656	980000	11309,38	71,97	20599,4
	2013	12811	1082500	11863,88	72,27	433465,5
	2014	16221	1226500	12541,01	72,93	83323,3
	2015	16125	1415000	13268,26	73,34	1249622,2
	2016	15804	1608945	14077,05	73,70	6160398,3
	2017	14568	1741682	14893,14	74,00	947488,0
	2018	14742	1893383	15817,43	74,35	523080,5

	2019	13679	2045422	16812,91	74,92	2663,2
Kota Depok	2011	86387	1243552	28412,63	76,96	1562342,8
	2012	78089	1424797	30703,25	77,28	174,0
	2013	69702	2042000	32805,89	78,27	1253694,2
	2014	80903	2397000	35192,76	78,58	1881008,7
	2015	72521	2705000	37525,11	79,11	1984550,4
	2016	72172	3046180	40263,23	79,60	890699,8
	2017	76025	3297489	42939,38	79,83	434217,0
	2018	73080	3584700	45870,49	80,29	1264321,5
	2019	72325	3872551	49076,63	80,52	4472631,5





Hasil Olah Data Eviews

Hasil Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(Pengangguran?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 11/18/20 Time: 20:49

Sample: 2011 2019

Included observations: 9

Cross-sections included: 19

Total pool (balanced) observations: 171

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(UMR?)	0.518086	0.054480	9.509641	0.0000
LOG(PDRB?)	0.551948	0.055732	9.903673	0.0000
IPM?	-0.030209	0.008184	-3.691151	0.0003
LOG(Investasi?)	-0.004659	0.021372	-0.217999	0.8277
R-squared	0.358384	Mean dependent var		11.14767
Adjusted R-squared	0.346858	S.D. dependent var		0.650578
S.E. of regression	0.525779	Akaike info criterion		1.575242
Sum squared resid	46.16608	Schwarz criterion		1.648732
Log likelihood	-130.6832	Hannan-Quinn criter.		1.605061
Durbin-Watson stat	0.326521			

Hasil *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOG(Pengangguran?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 11/18/20 Time: 21:15
 Sample: 2011 2019
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 19
 Total pool (balanced) observations: 171
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.71178	0.390433	27.43566	0.0000
LOG(UMR?)	0.018520	0.035761	0.517897	0.6053
LOG(PDRB?)	-0.051815	0.035166	-1.473435	0.1428
IPM?	0.016176	0.010448	1.548280	0.0034
LOG(Investasi?)	0.009168	0.004517	2.029709	0.0442
Fixed Effects (Cross)				
_KABUPATENBAND...	0.393897			
_KABUPATENBAND...	-0.036125			
_KABUPATENBEKASI...	0.673843			
_KABUPATENBOGO...	1.241728			
_KABUPATENCIANJ...	0.546107			
_KABUPATENCIREB...	0.495436			
_KABUPATENINDRA...	0.120481			
_KABUPATENKARA...	0.522048			
_KABUPATENKUNI...	-0.606497			
_KABUPATENPURW...	-0.574728			
_KABUPATENSUBA...	-0.051850			
_KABUPATENSUKA...	0.411328			
_KABUPATENSUME...	-0.495280			
_KOTABANDUNG--C	0.318465			
_KOTABEKASI--C	0.378065			
_KOTABOGOR--C	-0.491073			
_KOTACIMAHI--C	-1.148420			
_KOTACIREBON--C	-1.638633			
_KOTADEPOK--C	-0.058790			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.877434	Mean dependent var	16.58925
Adjusted R-squared	0.974081	S.D. dependent var	6.326619
S.E. of regression	0.162430	Sum squared resid	3.904759
F-statistic	291.4008	Durbin-Watson stat	1.877927
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.905409	Mean dependent var	11.14767
Sum squared resid	3.928021	Durbin-Watson stat	1.110308

Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(Pengangguran?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/18/20 Time: 20:50
 Sample: 2011 2019
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 19
 Total pool (balanced) observations: 171
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.81075	0.571965	18.90109	0.0000
LOG(UMR?)	0.015060	0.054079	0.278480	0.7810
LOG(PDRB?)	0.040018	0.047310	0.845861	0.3988
IPM?	-0.006078	0.013441	-0.452198	0.6517
LOG(Investasi?)	0.009529	0.007750	1.229523	0.2206
Random Effects (Cross)				
_KABUPATENBAND...	0.339066			
_KABUPATENBAND...	-0.102867			
_KABUPATENBEKASI...	0.529761			
_KABUPATENBOGO...	1.061069			
_KABUPATENCIANJ...	0.441879			
_KABUPATENCIREB...	0.445970			
_KABUPATENINDRA...	-0.030756			
_KABUPATENKARA...	0.344049			
_KABUPATENKUNI...	-0.549327			
_KABUPATENPURW...	-0.612869			
_KABUPATENSUBA...	-0.079394			
_KABUPATENSUKA...	0.287542			
_KABUPATENSUME...	-0.439160			
_KOTABANDUNG--C	0.430037			
_KOTABEKASI--C	0.535665			
_KOTABOGOR--C	-0.368787			
_KOTACIMAHI--C	-0.924024			
_KOTACIREBON--C	-1.438796			
_KOTADEPOK--C	0.130940			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.452829	0.8856
Idiosyncratic random	0.162793	0.1144

Weighted Statistics

R-squared	0.015081	Mean dependent var	1.326378
Adjusted R-squared	-0.008652	S.D. dependent var	0.170714
S.E. of regression	0.171451	Sum squared resid	4.879635
F-statistic	0.635460	Durbin-Watson stat	0.903468
Prob(F-statistic)	0.637897		

Unweighted Statistics

R-squared	0.100661	Mean dependent var	11.14767
Sum squared resid	64.71005	Durbin-Watson stat	0.068128

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL_DATA
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	149.429623	(18,148)	0.0000

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL_DATA
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.127109	4	0.0002

